

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

TRIWULAN III
2018





REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN III TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR



Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilakukan pemantauan dan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan pencapaian output kegiatan, dan realisasi penyerapan anggaran selama satu triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai berdasarkan laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri lainnya, beberapa contoh pembelajaran (*lesson learned*) juga disampaikan dalam laporan ini.

Realisasi penyerapan terhadap target tahun 2018 pada triwulan III mencapai 49,7 persen. Nilai ini lebih tinggi 8,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 41,1 persen, dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata penyerapan lima tahun terakhir pada triwulan ketiga, yaitu sebesar 46,0 persen. Meningkatnya kinerja penyerapan tersebut, antara lain disebabkan meningkatnya persentase penyerapan yang cukup signifikan pada sebagian besar instansi, bahkan terdapat beberapa instansi yang realisasi penyerapannya terhadap target mencapai 100 persen, yaitu BP Batam dan Kemenristekdikti. Berdasarkan kinerja dari masing-masing proyek, dalam Triwulan III Tahun 2018, terdapat 38 proyek yang memiliki kinerja dengan penyerapan cukup baik, yaitu mampu menyerap di atas 52,5 persen dari target penarikan pinjaman. Beberapa kendala yang masih menjadi penyebab rendahnya kinerja proyek, antara lain permasalahan pembebasan lahan, pengadaan barang/jasa, kinerja kontraktor yang buruk, dan adanya gangguan cuaca yang ekstrim.

Lesson learned atau pembelajaran pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang dicantumkan dalam laporan ini, antara lain dari proyek *Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia* pada Kementan yang memberikan pembelajaran tentang pentingnya pelatihan yang intensif kepada pendamping (fasilitator desa/PPL/supervisor) maupun masyarakat sebagai penerima manfaat dalam proyek yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat. Pada *The Support to Development of Islamic Higher Education Project* di Kemenag, didapatkan pembelajaran mengenai pentingnya PMU yang memiliki kapasitas dan kinerja tinggi, serta berkemampuan mengkoordinasikan kegiatan dan responsif, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan baik. Pembelajaran lainnya juga diperoleh dari proyek *Western Indonesia National Roads Improvement*, yaitu pelaksana proyek harus merespon setiap permasalahan di lapangan dengan tindak lanjut yang cepat, karena penyelesaian permasalahan proyek sangat tergantung pada kemampuan dan inovasi pelaksana proyek.

Untuk memastikan manfaat proyek serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri secara berkelanjutan, baik dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek, maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Di samping itu, pembelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang didapatkan selama siklus hidup proyek diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan selanjutnya. Sedangkan cara terbaik (*best practice*) yang diperoleh dapat disesuaikan serta diperluas atau direplikasi dengan sumber pendanaan lainnya sehingga berdampak lebih besar bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

DAFTAR ISTILAH

ADB	<i>Asian Development Bank</i>
AFD	<i>Agence Francaise de Development</i>
BIG	Badan Informasi Geospasial
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP Batam	Badan Pengusahaan Batam
BPS	Badan Pusat Statistik
EU	<i>European Union</i>
IsDB	<i>Islamic Development Bank</i>
IFAD	<i>International Fund for Agricultural Development</i>
JBIC	<i>Japan Bank for International Cooperation</i>
JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendes PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemen KP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemennaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemen PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kementan	Kementerian Pertanian
Kemen ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kemen	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
PPN/Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenristekdikti	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenhan	Kementerian Pertahanan
KSA	Kreditur Swasta Asing
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPKE	Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
SLA	<i>Subsidiary Loan Agreement</i> ; perjanjian penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah
PT. PII	PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT. Pertamina	PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PT. PLN	PT. Perusahaan Listrik Negara
PT. SMI	PT. Sarana Multi Infrastruktur

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri disusun berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan tersebut mencakup perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (tidak termasuk pinjaman program) dan kegiatan hibah yang direncanakan serta hibah langsung. Kurun waktu pemantauan proyek dilakukan mulai dari proyek efektif (*effective date*) sampai dengan proyek selesai (*closing date*).

GAMBARAN UMUM

Nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) pada akhir Triwulan III Tahun 2018 (posisi 30 September 2018) adalah sebesar ekuivalen USD 18.530,9 juta, yang terdiri dari 156 proyek dan dilaksanakan oleh 15 Kementerian/Lembaga, 4 BUMN, serta 1 Pemerintah Daerah. Nilai pinjaman ini mengalami peningkatan sebesar USD 2.316,7 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan ini disebabkan karena adanya beberapa proyek yang baru efektif. Sedangkan beberapa proyek yang sudah ditandatangani namun belum efektif, tidak termasuk dalam proyek yang sedang berjalan (*on going*) yang dipantau dan dicantumkan dalam laporan ini.

Realisasi penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 adalah sebesar USD 8.035,3 juta atau mencapai 43,4 persen dari total nilai pinjaman yang sedang berjalan. Sedangkan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 adalah USD 1.579,0 juta atau mencapai 49,7 persen dari target 2018 sebesar USD 3.177,5 juta. Persentase penyerapan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penyerapan pada triwulan ketiga dalam lima tahun terakhir, yaitu 46,0 persen. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan kinerja penyerapan proyek selama satu triwulan ini berjalan dengan cukup baik, yang diindikasikan dengan adanya sekitar 38 proyek yang mampu menyerap anggaran lebih dari 52,5 persen dari target penyerapan di tahun 2018. Namun, masih terdapat cukup banyak proyek yang sangat rendah penyerapannya atau bahkan belum mengalami penyerapan (*penyerapan nol*).

Beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya kinerja proyek, diantaranya adalah adanya gangguan cuaca yang ekstrim, rendahnya kinerja kontraktor, lambatnya proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan pembebasan lahan. Permasalahan pembebasan lahan tidak hanya disebabkan oleh sulitnya perijinan dan negosiasi ganti rugi warga terdampak, tetapi juga disebabkan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi.

Dalam laporan ini juga disampaikan pembelajaran (*lesson learned*) dari proyek yang masih berjalan dan proyek yang sudah selesai, serta uraian kinerja pelaksanaan dari beberapa proyek hibah luar negeri khususnya hibah yang direncanakan.

PINJAMAN LUAR NEGERI

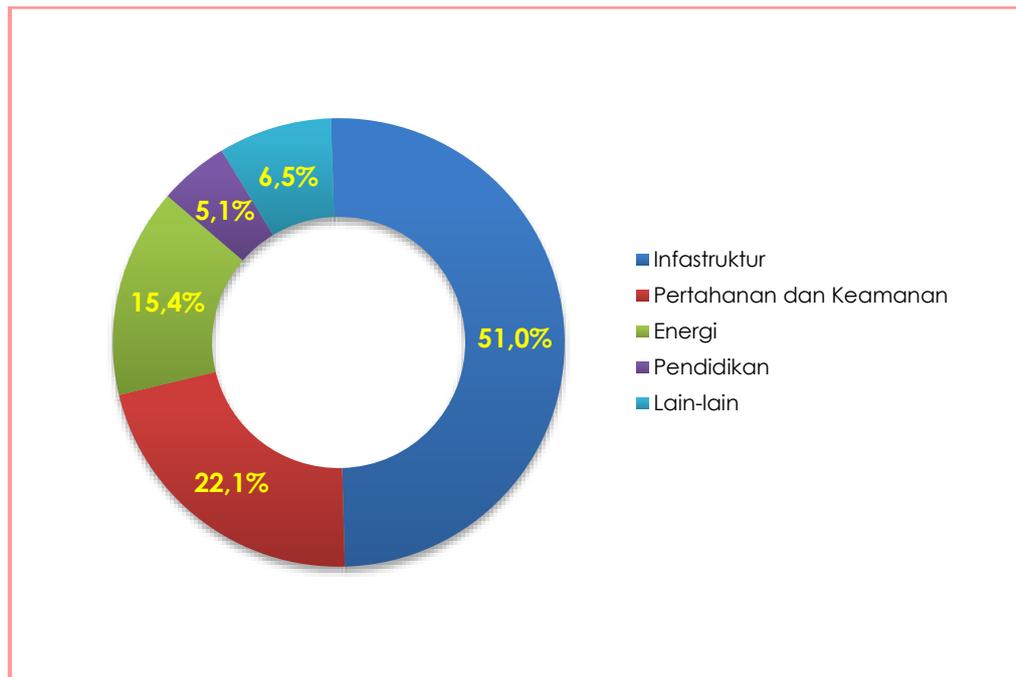
1. PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN III TAHUN 2018

Pinjaman luar negeri dapat dilihat profilnya berdasarkan pengelompokan dalam sektor pembangunan, berdasarkan instansi penanggung jawab, dan berdasarkan pemberi pinjaman (*lender*). Berdasarkan profil tersebut dapat diketahui komposisi pinjaman, nilai pinjaman, dan realisasi penyerapan pada Triwulan III Tahun 2018, serta perubahannya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama pada tahun 2017.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN ALOKASI SEKTORAL

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman luar negeri terbagi kedalam 5 (lima) sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Sektor lain-lain mencakup kesehatan, peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Komposisi dan alokasi nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2018 (diolah)

Pinjaman luar negeri sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dan energi, yaitu sekitar 66,4 persen. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, diantaranya untuk pengembangan sarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional, serta untuk mencapai target air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman luar negeri di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW di tahun 2019, melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya. Alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan III Tahun 2017), terdapat penurunan komposisi pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan, yaitu dari 25,5 persen menjadi 22,1 persen. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi di sektor energi, yaitu dari 18,9 persen turun menjadi 15,4 persen. Sektor pendidikan juga mengalami penurunan, yaitu dari 7,8 persen turun menjadi 5,1 persen. Sedikit penurunan juga terjadi pada komposisi pinjaman di sektor lain-lain, yaitu dari 6,9 persen menjadi 6,5 persen. Selain itu, dalam periode yang sama, komposisi pinjaman di sektor infrastruktur mengalami sedikit peningkatan dari 40,9 persen menjadi 51,0 persen. Perubahan komposisi pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang baru efektif dan adanya proyek-proyek yang sudah selesai (*closed*).

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor*(Ekuivalen Juta USD)*

Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
vcInfrastruktur	49	9.454,0	3.072,7	32,5	6.381,3	1.381,1	637,2	46,1
Energi	18	2.848,1	1.286,3	45,2	1.561,8	326,7	200,3	61,3
Pendidikan	12	944,6	491,6	52,0	453,0	197,4	132,7	67,2
Lain-lain	12	1.197,2	644,3	53,8	553,1	135,2	53,0	39,2
Pertahanan dan Keamanan	65	4.087,0	2.540,4	62,2	1.546,6	1.137,0	555,8	48,9
Total	156	18.530,9	8.035,3	43,4	10.495,7	3.177,5	1.579,0	49,7

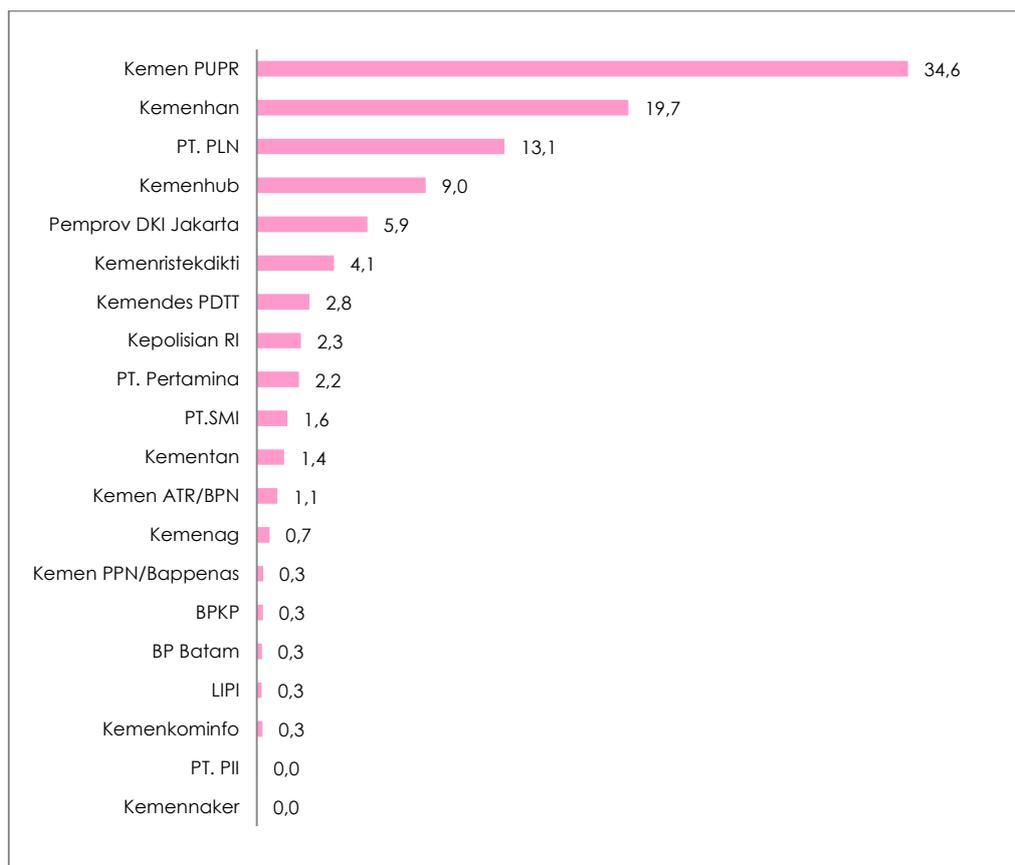
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2018 (diolah)

Secara umum realisasi penyerapan pada triwulan ini menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu naik dari 41,1 persen menjadi 49,7 persen. Berdasarkan data di tabel 2.1, sektor pendidikan memiliki kinerja penyerapan yang cukup tinggi, yaitu mampu menyerap 67,2 persen dari target penyerapan di tahun 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai 41,9 persen. Peningkatan kinerja penyerapan juga terjadi pada sektor energi dari 60,6 persen pada triwulan yang sama di tahun lalu menjadi 61,3 persen pada triwulan ini. Disamping itu, kinerja di sektor infrastruktur juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 37,1 persen pada Triwulan III Tahun 2017, menjadi 46,1 persen pada triwulan ini. Kinerja penyerapan di sektor pertahanan dan keamanan juga mengalami peningkatan, yaitu dari 40,2 persen pada triwulan yang sama di tahun lalu menjadi 48,9 persen pada triwulan ini. Demikian pula di sektor lain-lain, mengalami peningkatan kinerja penyerapan dari 30,6 persen pada Triwulan III Tahun 2017 menjadi 39,2 persen pada triwulan ini. Secara keseluruhan, setiap sektor pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Komposisi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggungjawab dapat dilihat dalam gambar 2.2. Proporsi terbesar berada di Kemen PUPR, Kemenhan dan PT PLN. Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan komposisi pinjaman selama triwulan ini, yaitu naiknya komposisi pinjaman pada Kemen PUPR dari 28,9 persen pada triwulan yang sama tahun lalu menjadi 34,6 persen pada triwulan ini. Namun, penurunan komposisi pinjaman terjadi pada Kemenhan, yaitu dari 22,7 persen pada triwulan yang sama tahun lalu menjadi 19,7 persen pada triwulan ini. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi pada PT. PLN yang mengalami penurunan dari 16,3 persen menjadi 13,1 persen pada triwulan ini. Selain itu, penurunan komposisi pinjaman juga terjadi pada beberapa instansi, seperti Kemennaker, Kemenristekdikti, dan Pemprov DKI Jakarta.

Gambar 2.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2018 (diolah)

Apabila dilihat dari nilai pinjaman, maka berdasarkan Tabel 2.2 terdapat peningkatan nilai pinjaman yang cukup signifikan dari Triwulan III Tahun 2017 ke Triwulan III Tahun 2018, yaitu meningkat sebesar USD 2.316,7 juta. Perubahan nilai pinjaman yang cukup signifikan terjadi pada Kemen PUPR yang naik sebesar USD 1.729,5 juta, dan Kemenhub yang naik sebesar USD 898,0 juta. Sedangkan PT. PLN mengalami penurunan nilai pinjaman sebesar USD 204,8 juta, dan Kemenristekdikti juga mengalami penurunan sebesar USD 187,8 juta. Perubahan nilai pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang telah selesai (*closing*), dan adanya proyek-proyek yang baru efektif. Dalam tahun 2018 sampai dengan triwulan III, di Kemen PUPR terdapat 2 proyek yang baru efektif, yaitu *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)*, dan *National Urban Water Supply Project (NUWSP)*. Adapun di Kemenristekdikti terdapat satu proyek baru, yaitu *Development of Teaching Hospital Hasanuddin University* yang dibiayai oleh Jerman (KfW), dan di Kemen ATR/BPN juga terdapat satu proyek yang baru efektif, yaitu *Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project)*. Ketiga proyek baru tersebut dibiayai oleh Bank Dunia.

Tabel 2.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/ Lembaga	133	14.292,0	6.045,8	42,3	8.246,2	2.598,6	1.286,0	49,5
BPKP	1	57,8	56,4	97,7	1,4	10,1	8,2	81,1
BP Batam	1	48,1	13,9	28,8	34,2	2,3	4,3	100,0
Kemenag	1	123,8	2,2	1,8	121,6	61,6	0,7	1,2
Kemendes PDTT	2	518,1	373,6	72,1	144,5	96,0	25,7	26,8
Kemennaker	1	2,5	1,3	52,0	1,2	1,1	0,4	36,8
Kemenkominfo	1	55,9	55,4	99,2	0,5	0,0	0,0	0,0
Kemen PUPR	39	6.404,5	2.113,3	33,0	4.291,3	825,7	414,0	50,1
Kemenuh	5	1.658,6	256,3	15,5	1.402,3	303,2	130,8	43,1
Kementan	4	267,5	121,3	45,4	146,3	24,3	13,6	55,9
Kemen ATR/BPN	1	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Kemen PPN/Bappenas	1	62,3	31,4	50,4	30,9	9,4	5,6	59,4
Kemenristekdikti	10	758,5	458,0	60,4	300,5	126,5	126,4	100,0
Kepolisian RI	18	432,9	232,8	53,8	200,1	261,1	72,5	27,7
Kemenhan	47	3.654,1	2.307,6	63,2	1.346,5	875,9	483,3	55,2
LIPI	1	47,4	22,3	47,1	25,1	1,5	0,8	54,1
Diteruspinjamkan (SLA)	21	3.152,7	1.302,5	41,3	1.850,2	327,6	200,3	61,1
PT. PII	1	4,6	3,7	79,6	0,9	0,9	0,0	0,0
PT. PERTAMINA	2	412,4	202,6	49,1	209,8	24,8	16,3	65,9
PT. PLN	16	2.435,7	1.083,7	44,5	1.352,0	301,9	183,9	60,9
PT. SMI	2	300,0	12,5	4,2	287,5	0,0	0,0	0,0
Diterushibahkan	2	1.086,2	687,0	63,2	399,2	251,2	92,4	36,8
Pemprov DKI Jakarta	2	1.086,2	687,0	63,2	399,2	251,2	92,4	36,8
Total	156	18.530,9	8.035,3	43,4	10.495,7	3.177,5	1.579,0	49,7

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2018 (diolah)

Pelaksanaan pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement* atau SLA), dan diterushibahkan. Dibandingkan dengan kinerja penyerapan tahun lalu (Triwulan III Tahun 2017), beberapa instansi penanggung jawab proyek mengalami peningkatan kinerja penyerapan yang cukup signifikan pada triwulan ini, yaitu BPKP, BP Batam, Kemen PUPR, Kementan, Kemen PPN/Bappenas, Kemenristekdikti, Kemenhan, LIPI, PT. Pertamina, dan PT. PLN. Beberapa instansi tersebut dikategorikan menjadi instansi yang memiliki kinerja penyerapan yang sangat baik karena telah melakukan penyerapan di atas 52,5 persen pada Triwulan III Tahun 2018. Selain terjadi peningkatan kinerja penyerapan pada beberapa instansi, pada triwulan ini juga masih terdapat cukup banyak instansi penanggungjawab yang belum melakukan penyerapan, sehingga tingkat penyerapannya masih sama atau bahkan belum melakukan penyerapan (nol).

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

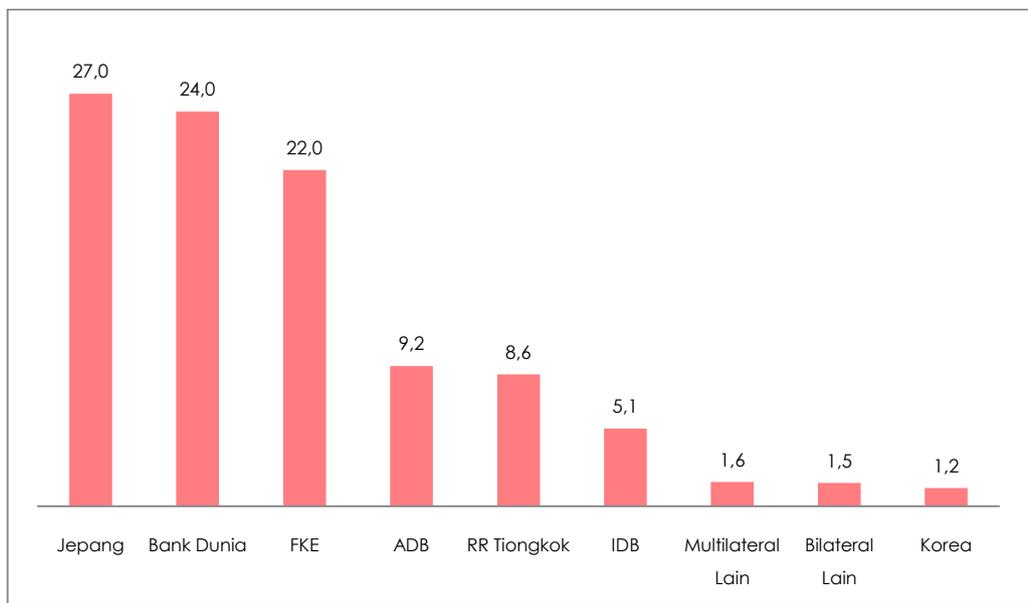
Pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 (tiga) kelompok sumber pinjaman, yaitu Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, dan *Saudi Fund*.

Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti Jepang, Hongaria, Jerman, Korea, Perancis, RR Tiongkok, dan Spanyol.

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*.

Gambar 2.3 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2018 (diolah)

Keterangan: - Pinjaman Multilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund
- Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Hongaria, Jerman, Perancis, dan Spanyol

Sekitar hampir 73,0 persen dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) berasal dari LPKE, Jepang dan Bank Dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3. Sedangkan sisanya terbagi ke dalam beberapa Kreditor Bilateral dan Kreditor Multilateral. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triwulan III Tahun 2017), terdapat perubahan yaitu adanya peningkatan secara signifikan komposisi pinjaman Bank Dunia dari 17,0 persen pada Triwulan III Tahun 2017 menjadi 24,0 persen pada Triwulan III Tahun 2018. Peningkatan komposisi juga terjadi pada porsi pinjaman Jepang yang naik dari 25,4 persen menjadi 27,0 persen. Kenaikan porsi pinjaman juga terjadi pada ADB dari 7,1 persen menjadi 9,2 persen. Sebaliknya, pada rentang periode yang sama, terjadi penurunan porsi pinjaman IDB dari 8,7 persen menjadi 5,1 persen, dan pinjaman LPKE dari 24,8 persen menjadi 22,0 persen. Penurunan porsi pinjaman juga terjadi untuk pinjaman RR Tiongkok dari 11,1 persen menjadi 8,6 persen. Untuk komposisi pada pemberi pinjaman lain tidak mengalami banyak perubahan.

Dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2018, pada triwulan ini nilai pinjaman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dilihat dari Tabel 2.3 secara total jumlah pinjaman senilai USD 18.530,9 juta mengalami peningkatan sebesar USD 552,3 juta dari triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan adanya beberapa proyek yang baru efektif, sehingga beberapa pemberi pinjaman mengalami peningkatan nilai pinjaman. Bank Dunia mengalami peningkatan nilai pinjaman yang paling signifikan, yaitu sebesar USD 778,0 juta.

Tabel 2.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Loan	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	Target	TA 2018 Realisasi	%
I	Kreditor Multilateral	55	7.372,1	2.712,7	4.659,5	843,1	432,1	51,2
	Bank Dunia	25	4.445,6	1.729,7	2.715,9	397,7	188,4	47,4
	ADB	14	1.697,6	458,1	1.239,5	160,1	53,9	33,7
	IDB	12	938,4	400,2	538,2	263,0	180,7	68,7
	IFAD	4	255,6	112,7	143,0	12,4	5,7	45,4
	Saudi Fund	1	35,0	12,0	23,0	9,9	3,4	33,9
II	Kreditor Bilateral	46	7.087,3	2.793,0	4.294,3	1.189,5	591,0	49,7
	Jepang	28	4.995,0	1.653,7	3.341,3	596,7	254,6	42,7
	Hongaria	1	36,4	23,8	12,6	5,5	4,6	83,6
	Jerman	2	120,6	11,8	108,8	0,6	0,0	0,0
	Korea	4	220,4	83,7	136,7	43,3	14,3	33,1
	Perancis+AF D	2	105,4	87,7	17,7	0,0	0,0	0,0
	RR Tiongkok	8	1.593,3	916,1	677,3	534,7	308,7	57,7
	Spanyol	1	16,2	16,2	0,0	8,7	8,7	100,0
III	KSA/LPKE	66	4.071,5	2.529,7	1.541,9	1.144,8	555,9	48,6
	TOTAL	167	18.530,9	8.035,3	10.495,7	3.177,5	1.579,0	49,7

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2018 (diolah)

Realisasi penyerapan pada Triwulan III Tahun 2018 yang mencapai 49,7 persen tersebut sebagian besar disumbang oleh kinerja proyek LPKE/KSA sebesar 48,6 persen, Kreditor Bilateral sebesar 49,7 persen dan Kreditor Multilateral sebesar 51,2 persen. Pada triwulan ini, kinerja tertinggi untuk Kreditor Multilateral dicapai oleh proyek-proyek pinjaman Bank Dunia dan IDB, yang masing-masing mencapai 47,4 persen dan 68,7 persen. Sedangkan pada Kreditor Bilateral, kinerja tertinggi terjadi pada proyek-proyek pinjaman Spanyol dan Hongaria, yaitu mencapai 100 persen dan 83,6 persen.

❖ REKAPITULASI PROYEK TUTUP DAN BARU DI TRIWULAN III TAHUN 2018

Pada tabel 2.4 berikut ini dapat dilihat beberapa proyek yang baru efektif dan masuk kedalam pemantauan triwulanan. Sedangkan pada tabel 2.5 dapat dilihat beberapa proyek yang telah selesai (*closed*) dalam satu triwulan ini sehingga dikeluarkan dari pemantauan pada Triwulan III Tahun 2018.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyek Baru Efektif di Triwulan III Tahun 2018

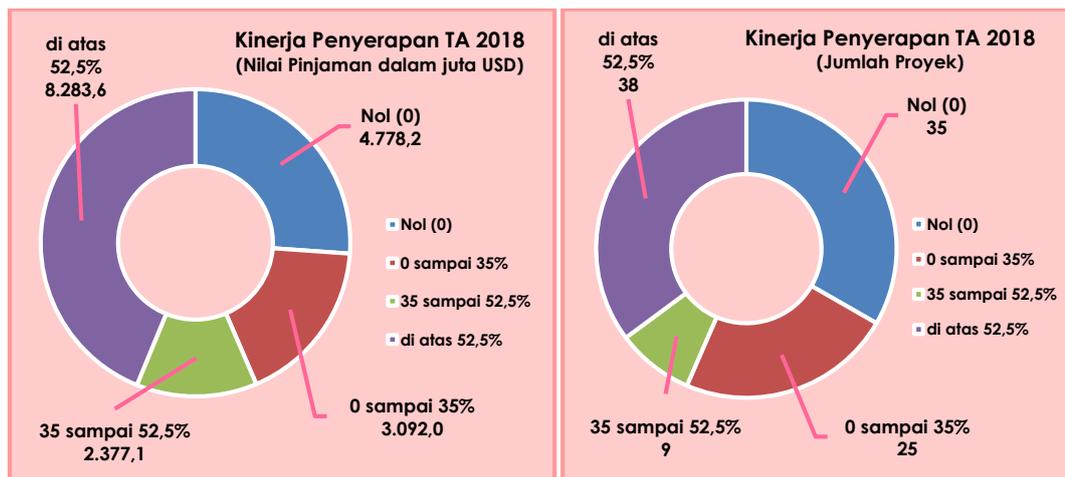
(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Baru Efektif				
1	Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project)	Kementerian ATR/BPN	Bank Dunia	200,0
3	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	Kemen PUPR	Bank Dunia	500,0
4	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	Kemen PUPR	Bank Dunia	100,0
5	Development of Teaching Hospital Hasanuddin University	Kemenristekdikti	Jerman (Kfw)	33,2
TOTAL				833,2

2. RINGKASAN KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN III TAHUN 2018

Berdasarkan target penyerapan tahun 2018, maka realisasi anggaran sampai dengan triwulan ini mencapai 49,7 persen. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, persentase realisasi penyerapan dalam triwulan ini mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh adanya beberapa proyek yang baru efektif. Realisasi penyerapan untuk proyek-proyek *soft loan* dari Kreditor Bilateral dan Multilateral cenderung mengalami peningkatan. Meskipun demikian, capaian kinerja setiap proyek sangat beragam, dimana terdapat proyek yang memiliki kinerja penyerapan cukup baik, bahkan mencapai diatas 52,5 persen dari target penyerapan, sebaliknya terdapat pula beberapa proyek yang belum melakukan penyerapan atau bahkan tidak mengalami pergerakan sejak mulai efektif sampai dengan Triwulan III Tahun 2018.

Gambar 2.4 Kinerja Penyerapan TA 2018 Berdasarkan Nilai Pinjaman dan Jumlah Proyek



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2018 (diolah)

Bila dilihat dari kinerja penyerapan, secara umum terdapat sekitar 38 proyek yang memiliki kinerja penyerapan baik yang mampu menyerap di atas 52,5 persen dari target penyerapan tahun 2018. Dilihat dari sisi nilai pinjaman, 38 proyek tersebut bernilai USD 8.283,6 juta atau 44,7 persen dari total nilai pinjaman sebesar USD 18.530,9 juta. Sekitar 60 proyek mengalami kinerja yang sangat lambat dan hanya mampu menyerap di bawah 35 persen terhadap target tahun 2018. Diantara proyek-proyek tersebut, terdapat proyek yang mengalami penyerapan nol (0) atau bahkan belum

menunjukkan adanya penyerapan sejak proyek dinyatakan efektif. Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap proyek-proyek tersebut karena nilainya mencapai USD 4.778,2 juta atau 25,8 persen dari total nilai pinjaman. Untuk meningkatkan kinerja proyek-proyek yang tergolong rendah penyerapannya tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan pertemuan intensif untuk menyelesaikan permasalahan proyek, dan mempercepat proses revaluasi terhadap perubahan atau revisi rencana pelaksanaan proyek.

Beberapa permasalahan masih terjadi dalam pelaksanaan proyek dalam triwulan ini. Permasalahan pertama terkait dengan revisi desain (DED) proyek, yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek karena adanya perubahan-perubahan pada ruang lingkup, nilai, dan lokasi proyek. Permasalahan kedua adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang antara lain disebabkan oleh lamanya revaluasi dokumen lelang, lamanya penerbitan NOL, dan tidak adanya penawaran yang masuk (gagal lelang). Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pengadaan lahan baik yang disebabkan karena proses perijinan, maupun terkait dengan isu pemukiman kembali, dan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah administrasi seperti kekurangan alokasi DIPA, keterlambatan penerbitan *Withdrawal Application* (WA) dan pengesahan (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan/SP3) juga masih sering terjadi. Permasalahan lainnya yang saat ini mulai sering dilaporkan adalah rendahnya kinerja kontraktor yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek, disamping masalah terkait lainnya seperti kekurangan tenaga kerja, material dan peralatan berat, serta kendala cuaca ekstrem dan kondisi geologi *site project*.

3. LESSON LEARNED PELAKSANAAN PROYEK

Pada Triwulan III Tahun 2018 ini terdapat beberapa proyek yang bisa dijadikan pembelajaran. Dalam laporan ini, dipaparkan 3 (tiga) contoh proyek. Proyek-proyek tersebut adalah proyek yang sedang berjalan dan proyek yang sudah *closing*, yaitu *Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia* yang dikelola oleh Kementan, *The Support to The Development of Islamic Higher Education Project* yang dikelola oleh Kemenag, dan *Western Indonesia National Road Improvement Project* yang dikelola oleh Kemen PUPR.

Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia

Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil atau *Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia* merupakan proyek pinjaman luar negeri yang dibiayai oleh IFAD. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan keluarga, serta mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

Proyek ini memiliki empat komponen, yaitu (i) pemberdayaan masyarakat dan gender, (ii) peningkatan produksi pertanian dan pemasaran, (iii) dukungan pengembangan rantai nilai (*value chain*) komoditas perkebunan, dan (iv) dukungan manajemen proyek. Adapun hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan proyek ini adalah (i) berfungsinya kelembagaan desa, kelompok tani dan gabungan kelompok tani secara efektif, (ii) petani/penerima manfaat mampu meningkatkan produksi pertanian yang berakses pasar dengan penyediaan agro-input dan sarana usaha produktif yang memadai, (iii) masyarakat mampu memilih komoditas unggulan untuk memperoleh daya saing pasar yang memberikan nilai tambah dan menguntungkan, (iv) Kelompok Mandiri (KM) dan gabungan Kelompok Mandiri atau Federasi mampu mengorganisir masyarakat dalam menghasilkan dan memasarkan usaha rantai nilai (*value chain*) terhadap komoditas yang ditargetkan, (v) peningkatan prasarana berskala kecil yang tersedia di desa-desa sasaran dengan melibatkan organisasi berbasis masyarakat untuk pemeliharaan prasarana tersebut, dan (vi) penyelesaian proyek tepat waktu dan sesuai anggaran yang telah disepakati.

Proyek senilai SDR 40,065 juta ini mulai efektif sejak 5 Juli 2011 dan akan segera berakhir di 31 Juli 2019, dengan lokasi pelaksanaan yang tersebar di dua propinsi, yaitu:

- 1) Provinsi Maluku, meliputi Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Buru.
- 2) Provinsi Maluku Utara, meliputi Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Secara umum kegiatan dari proyek SOLID memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya terkait dengan penambahan pemahaman dan keterampilan dalam usaha pertanian dan perkebunan,

sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena dapat memproduksi barang dengan nilai jual yang lebih tinggi. Meskipun capaian dari pelaksanaan proyek ini di sebagian besar lokasi dinilai cukup baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain:

- 1) Belum maksimalnya peran Federasi dalam mendorong kelompok Mandiri dalam sistem perencanaan usaha berbasis sumberdaya lokal dan kebutuhan/permintaan pasar. Selain itu, pengolahan dan hasil produksi pertanian juga belum berkelanjutan (*sustainable*).
- 2) Belum adanya sertifikasi hasil produk Kelompok Mandiri/Federasi untuk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
- 3) Belum terbentuknya model Pengelolaan Pengembangan Sentra Bisnis Kabupaten (PSBK) yang terintegrasi dengan desa-desa pendukung.
- 4) Belum terbentuknya sistem rantai pasar sebagai bentuk komitmen investasi yang menunjang pemasaran produksi petani melalui PSBK.
- 5) Kualitas hasil produksi pertanian belum memenuhi standar sesuai permintaan pasar atau mitra usaha, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas produk.
- 6) Kelompok Mandiri cenderung masih tergantung kepada bantuan proyek SOLID, dan belum memiliki rencana usaha berbasis kemandirian atau kemitraan dengan pihak lain. Masyarakat cenderung bersifat pasif dan kurang kreatif dalam mengembangkan kemampuan bertani dan produksi, sehingga hanya menunggu bimbingan dan pelatihan dari fasilitator atau pihak lain. Oleh karena itu, peran fasilitator dinilai cukup penting dalam melakukan pendampingan masyarakat.
- 7) Sarana dan prasarana yang sudah diberikan melalui proyek SOLID belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan hasil produksi pertanian Kelompok Mandiri. Penambahan modal secara kuantitatif dari dana bergulir (*revolving fund*) juga dinilai cukup kecil sebagai modal usaha, sehingga pemanfaatannya cenderung digunakan sebagai tambahan modal saja (bukan untuk usaha baru atau malah digunakan untuk keperluan konsumtif)

Adapun beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan *Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia* adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat, maka pelatihan yang intensif perlu diberikan kepada pendamping (PPL/Fasdes/Supervisor) maupun masyarakat penerima manfaat (Kelompok Mandiri/Federasi). Khusus untuk Kelompok Mandiri, pelatihan penggunaan sarana produksi sangat penting untuk menunjang produksi PSBK.
- 2) Model kelembagaan sentra bisnis perlu ditetapkan secara nasional sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda.
- 3) Integrasi dan koordinasi bersama multi program perlu dibangun untuk menyatukan model perencanaan dan alokasi bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing kabupaten yang terpilih sebagai lokasi kegiatan SOLID.
- 4) Setiap kabupaten perlu mempertimbangkan untuk memprioritaskan satu desa PSBK sebagai pilot perencanaan dan pengelolaan produksi hasil pertanian yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan melalui kebijakan regulasi dan dukungan pendanaan dari APBD untuk pengembangan sentra bisnis maupun kegiatan lainnya yang terkait *exit strategy* kegiatan SOLID, diantaranya:
 - a) Replikasi program.
 - b) Pelatihan peningkatan kualitas SDM bagi PPL.
 - c) Pelatihan teknologi tepat guna.
 - d) Sertifikasi hasil produksi pertanian.
 - e) Insentif untuk pendampingan oleh LSM.
 - f) Membangun jejaring pemasaran dan membantu kerjasama antara Kelompok Mandiri/Federasi dengan perusahaan daerah terkait dengan pengolahan hasil produksi pertanian.
 - g) Membantu pembentukan Lembaga Usaha/Keuangan berbadan hukum.
 - h) Membangun sarana jalan menuju sentra bisnis.
- 5) Proyek SOLID memiliki potensi untuk dapat direplikasi, namun dengan beberapa perbaikan sehingga diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Perbaikan-perbaikan tersebut diantaranya:
 - a) Desain proyek perlu melibatkan masyarakat yang lebih luas, khususnya pemuda desa. Hal tersebut dilakukan untuk proses *transfer of knowledge* dari fasilitator kepada pemuda desa, sehingga pemuda desa dapat dilibatkan untuk membantu petani

- dalam hal manajerial, pemasaran, dan *networking* untuk meningkatkan usaha dan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan masyarakat.
- b) Jenis usaha dalam satu desa perlu disusun secara beragam dengan melihat keberagaman potensi wilayah desa.
 - c) Jaringan dengan pembeli/pengepul atau pengusaha untuk bermitra dengan masyarakat perlu ditingkatkan, sehinggalah produksi dan pemasaran dapat bertanjat.
 - d) Pemasaran perlu diperluas dengan memanfaatkan media online (toko online), khususnya untuk produk-produk yang mudah dikemas dan dikirim ke berbagai wilayah (seperti VCO, minyak kayu putih, dan sebagainya). Hal ini sangat penting, karena saat ini pemasaran hanya terbatas pada wilayah sekitarnya, dan pemasaran masih sebatas dicantumkan di website pemerintah daerah yang umumnya jarang diakses konsumen dibandingkan dengan online shop.
 - e) Pengadaan peralatan pertanian perlu menjadi perhatian terutama terkait kualitas barang disamping harga yang kompetitif, karena pemakaian peralatan untuk masyarakat dalam skala besar dengan intensitas yang tinggi.

Gambar 2.5 Dokumentasi Site Visit Proyek SOLID



The Support to The Development of Islamic Higher Education Project

The Support to The Development of Islamic Higher Education Project merupakan proyek pinjaman dari IDB senilai USD 123,8 juta yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, dan meliputi empat lembaga pendidikan tinggi Islam, yaitu UIN Sumatera Utara, UIN Raden Fatah, UIN Walisongo, dan UIN Mataram.

Loan Agreement proyek ini ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2012, tetapi baru mulai efektif pada tanggal 18 Mei 2013, dan akan segera berakhir pada 31 Desember 2018. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas lembaga pendidikan tinggi Islam melalui penataran, melengkapi dan mengembangkan kurikulum serta keterampilan staf pengajar. Adapun sasaran proyek yang ingin dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana serta peningkatan dan pengembangan kapasitas.

**Tabel 2.5 Data Umum *The Support to The Development of Islamic Higher Education Project*
(Loan IDB IND-0164)**

Nama Proyek	<i>The Support to Development of The Islamic Higher Education Project</i>
Instansi Pelaksana	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Sumber Pembiayaan	a) IDB USD 26.319.440 b) GOI USD 10.132.110
Ruang Lingkup Pekerjaan	a) <i>Civil work</i> b) <i>Furniture and fixture</i> c) <i>Equipment</i> d) <i>Curriculum development</i> e) <i>Training program</i>
Lokasi	a) UIN Walisongo, Semarang b) UIN Sumatera Utara, Medan c) UIN Raden Fatah, Palembang d) UIN Mataram, Mataram
Masa Berlaku	18 Mei 2013 – 31 Desember 2018

Pelaksanaan konstruksi *The Support to The Development of Islamic Higher Education Project* tertunda cukup lama karena adanya keterlambatan dalam pelaksanaan lelang konsultan yang berlarut-larut. PIU yang berhasil melaksanakan kontrak *civil work* pertama adalah UIN Walisongo Semarang. Pembangunan fisik di UIN Walisongo meliputi delapan gedung, yaitu:

- 1) *Library and ICT Center* terdiri dari 4 lantai dengan luas 4.000 m².
- 2) *Rectorate/Administration Building* terdiri dari 4 lantai dengan luas 4.000 m².
- 3) *Integrated Laboratory* terdiri dari 3 lantai dengan luas 3.000 m².
- 4) *Planetarium* terdiri dari 2 lantai dengan luas 2.400 m².
- 5) *Faculty of Science and Technology* terdiri dari 4 lantai dengan luas 4.000 m².
- 6) *Faculty of Social and Humanity* terdiri dari 3 lantai dengan luas 3.000 m².
- 7) *Faculty of Tarbiyah and Education* terdiri dari 3 lantai dengan luas 3.000 m².
- 8) *Faculty of Syariah* terdiri dari 3 lantai dengan luas 3.000 m².

Adapun beberapa isu yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan konstruksi di UIN Walisongo, antara lain:

- 1) DIPA 2018 sebesar Rp 88,7 miliar diperkirakan hanya dapat terserap sebesar Rp 60 miliar.
- 2) Alokasi anggaran untuk *civil work* tidak memenuhi kebutuhan konstruksi sesuai desain DEDC, sehingga sebagai solusinya ada beberapa item pekerjaan yang tidak disertakan dalam paket pengadaan, namun direncanakan adanya CCO dengan memanfaatkan selisih OE dengan penawaran/kontrak. Selain itu juga terdapat kekurangan alokasi anggaran untuk planetarium, sehingga diusahakan adanya alternatif teknologi untuk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
- 3) PIU UIN Walisongo merencanakan pelaksanaan konstruksi selesai dalam waktu 14 bulan, tetapi IDB menyarankan pelaksanaan konstruksi sampai dengan 16 bulan. Akhirnya PIU mengikuti saran IDB dengan catatan bahwa pelaksanaan konstruksi tetap ditargetkan selesai dalam waktu 14 bulan meskipun tersedia waktu sampai dengan 16 bulan. Untuk 2018 diperkirakan sampai dengan akhir Desember kemajuan konstruksi fisik mencapai 30%. Dalam hal ini kontraktor sudah mengantisipasi kondisi cuaca dan memperhitungkan semua pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi tanah. Terkait pelaksanaan konstruksi fisik, terdapat permasalahan dengan pemenuhan bahan bangunan karena terdapat pasokan tiang panjang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada saat pemesanan, kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan sedikitnya dua gedung.

Beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan *The Support to The Development of Islamic Higher Education Project* adalah sebagai berikut:

- 1) Proyek ini sudah efektif sejak Mei 2013 tetapi NOL untuk kontrak konstruksi baru terbit pada Januari 2018. Kondisi tersebut merupakan masalah yang dihadapi oleh semua PIU sebagai

akibat lemahnya koordinasi dan kinerja pokja di tingkat PMU. Mengingat waktu pelaksanaan konstruksi sudah mendekati *closing date*, maka Kemenag sudah mengajukan usulan perpanjangan masa laku *loan* kepada IDB. Inspektorat Kemenag juga mulai melakukan pemantauan internal yang lebih intensif kepada PMU dan PIU untuk mempercepat penyelesaian permasalahan proyek dan mencegah terjadinya keterlambatan lagi.

- 2) Pemantauan kinerja konsultan dalam proyek ini sulit dilakukan karena konsultan terikat kontrak dengan PMU, tetapi bekerja untuk PIU, sehingga bila terjadi permasalahan dengan konsultan, PIU harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan PMU, rantai koordinasinya terlalu panjang.

Gambar 2.6 Dokumentasi Site Visit The Support to The Development of Islamic Higher Education Project



Western Indonesia National Roads Improvement

Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP) merupakan proyek penanganan jaringan jalan nasional/arteri primer berbantuan pinjaman Bank Dunia (IBRD Loan 8043-ID), yang dilaksanakan oleh Dirjen Bina Marga Kemen PUPR. *Loan signing* dilakukan pada tanggal 14 Desember 2011 dan mulai efektif sejak tanggal 13 Maret 2012. Tujuan umum dari proyek WINRIP ini adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan fungsi jalan nasional di koridor pantai barat Sumatera, khususnya di empat provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung), dengan menurunkan biaya operasional kendaraan melalui:

- a) Peningkatan standar kondisi jalan.
- b) Penciptaan jalan yang berkeselamatan.
- c) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi untuk publik.
- d) Pengembangan institusi.
- e) Penyediaan penanganan pasca bencana (apabila ada).

Selain tujuan diatas, juga diharapkan melalui proyek ini dapat ditingkatkan koordinasi penanganan dan pengelolaan proyek, khususnya di bidang jalan, baik di tingkat pusat maupun regional/provinsi melalui peningkatan kemampuan teknis instansi-instansi terkait.

Adapun kegiatan utama yang dilaksanakan pada proyek WINRIP mencakup empat komponen, yaitu:

- 1) Komponen 1: Peningkatan jalan dan penambahan kapasitas (*betterment and capacity expansion*) jaringan jalan nasional sepanjang 715,6 km termasuk penggantian jembatan sepanjang 194 m.
- 2) Komponen 2: Kegiatan pada komponen ini mendukung pelaksanaan (*implementation support*) kegiatan konstruksi dengan:
 - a) Penyediaan *Core Team Consultant* (CTC) untuk mendukung *Project Management Unit* (PMU) dalam mengelola pelaksanaan pinjaman proyek WINRIP, dan penyediaan *Design Supervision Consultant* (DSC) untuk menyiapkan perencanaan teknis (*detailed design engineering*), dan pengawasan pelaksanaan konstruksi fisik proyek WINRIP.
 - b) Dukungan terhadap kegiatan manajemen dan audit teknis.
- 3) Komponen 3: Pengembangan institusi sektor jalan (*road sector institutional development*), yaitu *capacity building* untuk Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan

(*Environment/Risk Mitigation and Road Safety Unit*) terkait dengan penanganan dampak lingkungan pembangunan jalan dan jembatan program WINRIP dan pemetaan bencana (*mitigation disaster risk*) pada wilayah cakupan program WINRIP.

- 4) Komponen 4: *Contingency for Disaster Risk Response*, kegiatan yang dimaksudkan untuk penyediaan respon tindakan cepat terhadap kondisi bencana (jika diperlukan).

Berdasarkan kegiatan utama tersebut diatas, maka elemen-elemen indikator kinerja output dari proyek WINRIP adalah sebagai berikut:

- 1) Penurunan waktu tempuh rata-rata sekurang-kurangnya 20%.
- 2) Biaya operasional kendaraan berkurang 5% untuk kendaraan ringan, 8% untuk bus dan 10% untuk kendaraan berat.
- 3) Lalu lintas Harian (LHR) bertumbuh seperti yang diharapkan/diproyeksikan.
- 4) Bertambahnya kilometer panjang jalan sesuai dengan yang direncanakan.
- 5) Bertambahnya panjang meter jembatan yang sudah ditingkatkan.
- 6) Pencapaian audit teknis yang sesuai spesifikasi.
- 7) Pemenuhan audit keselamatan untuk semua paket konstruksi.
- 8) Peningkatan kemampuan staf Subdit Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan sesuai dengan tupoksinya untuk WINRIP.

**Tabel 2.6 Data Umum Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)
(Loan IBRD 8043_ID)**

Nama Proyek	Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)
Instansi Pelaksana	Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumber Pembiayaan	Bank Dunia USD 250.000.000
Ruang Lingkup Pekerjaan	a) Bagian 1: Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional b) Bagian 2: Dukungan Implementasi c) Bagian 3: Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan d) Bagian 4: Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana
Lokasi	a) Provinsi Bengkulu b) Provinsi Lampung c) Provinsi Sumatera Utara d) Provinsi Sumatera Barat
Masa Berlaku	13 Maret 2012 – 31 Desember 2018

Secara umum pelaksanaan proyek WINRIP cukup baik dengan kemajuan pekerjaan fisik sampai dengan Triwulan III 2018 mencapai 87,79%, dan realisasi penyerapan kumulatif sebesar 75,4% atau sekitar USD 188,4 juta.

Adapun beberapa isu yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan konstruksi proyek WINRIP, antara lain:

- 1) Perijinan.
Adanya isu mengenai perijinan terkait pengerukan bahan material yang dipakai untuk pembangunan jalan. Kapolri memberikan peringatan terkait bahan bumi dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bahan Mineral dan Tambang. Kondisi saat ini, Polda setempat beranggapan bahwa seluruh bahan mineral dan tambang dianggap sama.
- 2) Kontraktor.
 - Adanya kontraktor yang diputus kontraknya pada Paket 21 karena memiliki kinerja yang buruk. Awalnya pihak Bank Dunia menyetujui kontraktor dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang, namun ternyata kontraktor tersebut meniadakan pembiayaan untuk peralatan/mesin, sehingga rendahnya harga penawaran tidak sebanding dengan kualitas pekerjaan.
 - Kontraktor pada Paket 14 mengalami kekurangan *manpower* dan material yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

- 3) Perpanjangan masa laku pinjaman.

Kemen PUPR berencana untuk melakukan perpanjangan masa laku pinjaman sampai dengan bulan November 2019 dengan pertimbangan adanya pelaksanaan lelang ulang untuk Paket 21, serta adanya pekerjaan pada paket-paket lainnya yang masih terhambat penyelesaiannya.

Beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan *Western Indonesia National Roads Improvement* (WINRIP) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian permasalahan proyek sangat tergantung pada kemampuan dan inovasi pelaksana proyek. Beberapa permasalahan dalam proyek WINRIP dapat segera diselesaikan dengan cara meningkatkan koordinasi dan kerjasama para pihak yang terkait untuk memutuskan alternatif solusi terbaik dari setiap masalah.
- 2) Pelaksana proyek harus merespon setiap permasalahan di lapangan dengan tindak lanjut yang cepat, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak berlarut-larut.

Gambar 2.7 Dokumentasi Site Visit Western Indonesia National Roads Improvement Project



HIBAH LUAR NEGERI

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan terhadap pelaksanaan hibah luar negeri bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mencari solusi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasil pemantauan selain digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan, juga digunakan sebagai pembelajaran dalam pengambilan kebijakan maupun replikasi, serta *scaling up* kegiatan di masa mendatang.

Hibah luar negeri yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan II Tahun 2018 berjumlah 5 (lima) proyek hibah terencana, yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Biodiversity Conservation and Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah ini dimulai sejak 28 November 2016, dan akan berakhir pada 31 Desember 2019. Kegiatan yang didanai oleh *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW) senilai € 8.460.000 ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ekosistem Leuser berkelanjutan dalam rangka menurunkan deforestasi dan merestorasi hutan yang terdegradasi, sehingga berkontribusi pada konservasi di kawasan yang memiliki salah satu cadangan karbon terbesar di Asia. Lokasi kegiatan hibah berada di bagian terbesar dari ekosistem Gunung Leuser, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan kota Subulussalam.

Pelaksanaan kegiatan hibah diharapkan dapat memberikan beberapa output sebagai berikut:

- a) Output pertama yang dilaksanakan oleh Dinas LHK Provinsi Aceh, yaitu mendukung pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat di 3 (tiga) kabupaten dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi konservasi dan penyelesaian konflik dengan ekosistem Gunung Leuser (minimum 40 desa) melalui kegiatan:

- Perencanaan penggunaan lahan dan tata batas area konservasi.
 - Penerapan pendekatan pembangunan yang berorientasi konservasi termasuk Hutan Rakyat dan *agroforestry*.
 - Pembangunan Pusat GIS untuk mendukung MRV dan perencanaan penggunaan lahan.
- b) Output kedua yang dilaksanakan oleh UPT BKSDA Aceh dan BBTN Gunung Leuser adalah meningkatkan kapasitas instansi terkait dalam hal konservasi melalui kegiatan:
- Pembentukan tambahan Unit Pengendali Konflik CRU dan dukungan terhadap CRU yang ada.
 - Pengelolaan SM Rawa Singkil.
 - Pembangunan stasiun rehabilitasi orang utan dan penelitian orang utan di TN Gunung Leuser.
 - Dukungan terhadap TN Gunung Leuser infrastruktur dan pengembangan koridor Trumon.
 - Penetapan kajian penyelesaian konflik harimau.

Secara umum perkembangan pelaksanaan hibah cukup baik, beberapa capaian dari masing-masing output antara lain: 1) reboisasi hutan rakyat dan *agroforestry*, 2) penetapan batas TNGL dan batas desa, 3) kesepakatan konservasi desa, 4) mitigasi konflik satwa, 5) sosialisasi patroli, 6) pendidikan konservasi, *smart patrol*, dan konservasi penyus/orang utan. Beberapa kegiatan juga telah direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2018 ini, yaitu:

Dinas LHK Provinsi Aceh:

- 1) Melaksanakan *Partisipatif Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Land Use Planning* (PLUP) dan Rencana Pembangunan Desa (RPD) di minimal 14-20 desa.
- 2) Melaksanakan patroli desa di minimal 40 desa.
- 3) Melaksanakan operasi 24 Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan kapasitas 950.000 bibit.
- 4) Melaksanakan penanaman minimal 700 Ha dengan model reboisasi dan pengayaan (ekorestorasi).
- 5) Melaksanakan Hutan Desa Lisensi minimal 3.000 Ha.
- 6) Melaksanakan Kesepakatan Konseravsi di minimal 14 desa, dan PES di minimal 40 desa.
- 7) Latihan dan studi untuk staf dan masyarakat.
- 8) Membina tiga produk non kayu (rotan/kerajinan, madu, gula aren/nipah).
- 9) Kelembagaan di 26 desa.
- 10) Batas rekonstruksi 66 km, dan bisa ditambah.

BKSDA Aceh:

- 1) Dukungan untuk penguatan manajemen SM Rawa Singkil.
- 2) Dukungan untuk rehabilitasi stasiun Orang Utan di SM Rawa Singkil dan mengembangkan pendekatan ekowisata untuk stasiun di Lai Trup.
- 3) Dukungan untuk tindakan resolusi konflik satwa liar (gajah, orang utan, dan beruang).
- 4) *Smart Patrol*, Patroli Gabungan dan Patroli Rutin.
- 5) Pendidikan konservasi bagi masyarakat.
- 6) *Study Tour*.

BB TN Gunung Leuser:

- 1) Dukungan untuk pengelolaan Rawa Kluet.
- 2) Rehabilitasi stasiun riset orang utan di Suaq Belimbing.
- 3) Pelaksanaan penelitian harimau untuk menyelesaikan konflik satwa liar dengan harimau.
- 4) Rehabilitasi stasiun penyus di Rantau Sialang.
- 5) *Smart Patrol*, Patroli Gabungan dan Patroli Rutin.
- 6) Pendidikan konservasi bagi masyarakat.
- 7) *Study Tour*.

**Gambar 3.1. Dokumentasi kegiatan Hibah
Biodiversity Conservation and Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem**



Forest Programme I : Forest and Climate Change Program (Forclime), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Forest and Climate Programme (Forclime) merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi REDD+ pada tingkat proyek yang nantinya mendukung kebijakan terhadap kerangka kerja REDD+ di tingkat subnasional maupun nasional. Kegiatan hibah ini terdiri dari dua modul, yaitu *Forclime Financial Cooperation* atau *Forest Programme I*, dan *Forclime Technical Cooperation*.

Forclime Financial Cooperation (Forest Programme I) merupakan hibah terencana senilai EUR 22 juta (termasuk 10 persen kontribusi dari Pemerintah Indonesia) yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lokasi di Jakarta, Kapuas Hulu (Kalimantan Timur), Berau (Kalimantan Barat), dan Malinau (Kalimantan Tenggara).

Tujuan dan capaian *Forclime Financial Cooperation* adalah sebagai berikut:

- a) Penurunan emisi karbon sebesar 300.000 – 400.000 Ton CO₂ eq per lokasi *Demonstration Activities*:
 - Penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL): FREL kabupaten 3,42 Mt CO₂e per tahun, REL DA REDD+ 0,11 Mt CO₂ per tahun, RL DA REDD+ 0,10 Mt CO₂ per tahun. Capaian pengurangan emisi 130.000 CO₂ net gain karbon (2015-2016).
 - Pemetaan partisipatif batas administrasi 44 desa. Batas desa yang sudah ditandatangani Bupati sebanyak 9 desa.
 - Perencanaan guna lahan partisipatif 23 desa.
 - Inventarisasi lokasi investasi 36 desa.
 - Persemaian di 54 desa, produksi 2.199.595 bibit dan penanaman 1.157.983 batang (luas penanaman 3.729,7 ha yang melibatkan 5.095 KK).
 - Patroli perlindungan dan pengamanan hutan berbasis masyarakat di 47 desa dengan cakupan area per desa minimal 8.000 ha.
 - Monitoring keanekaragaman hayati di 41 desa.
 - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 41 desa.
 - Pembangunan demplot *silvofishery* sebanyak 1 unit.
 - Pembangunan demplot tanaman hortikultura sebanyak 3 unit.
 - Pembangunan demplot tanaman cabai dan buah masing-masing sebanyak 2 unit.
- b) Memperkuat pengelolaan hutan secara lestari, yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui perhutanan sosial yang meliputi hutan desa 8 unit, hutan adat dan hutan kemasyarakatan, serta dukungan terhadap PHPL melalui RIL dan HCVF.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui pengembangan fasilitator di tiga kabupaten (67 desa) sebanyak 310 orang, dan penyaluran dana ke masyarakat.

Forclime Technical Cooperation merupakan hibah langsung berupa bantuan teknis dari *German Ministry for Economic Cooperation and Development* senilai lebih dari EUR 35 juta sejak tahun 2009, dan baru akan berakhir pada tahun 2020. Hibah ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lokasi di Jakarta, Kapuas Hulu (Kalimantan Timur), Berau (Kalimantan Barat), Malinau (Kalimantan Tenggara), dan Sigi (Sulawesi Tenggara). Tujuan dari *Forclime Financial Cooperation* adalah menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan, mengkonservasi keanekaragaman hayati, dan menerapkan pengelolaan hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dilaksanakan

melalui tiga area strategis, yaitu kerangka kebijakan nasional dan daerah, pembangunan KPH, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan Hibah Forclime



Kegiatan utama *Forclime* meliputi beberapa kegiatan, yaitu (a) *Participatory Land Use Planning* (PLUP), (b) Persemaian masyarakat, (c) *Agroforestry*/penanaman, (d) Pemeliharaan, (e) Perlindungan hutan/patrol hutan, (f) Pengembangan HHBK, (g) Perhutanan sosial, dan (h) Dukungan sertifikasi FSC. Adapun capaian dari kegiatan utama tersebut adalah:

- a) Emisi dikurangi di 5 DA sampai 2016: 1.028.919,86 tCO₂e atau 205.783.972 tCO₂e/DA.
- b) Luas area *agroforestry*: 4.989 Ha.
- c) Luas area patroli 2017: 168.462,67 Ha.
- d) Hutan Desa (2 di Berau, 3 di Kapuas Hulu).
- e) *Agroforestry*: 4.587 KK.
- f) Patroli Hutan Berbasis Masyarakat: 170 Tim.
- g) Demplot hortikultura dan *silvofishery* melibatkan 68 desa (\pm 10 desa di Mangrove).
- h) Untuk pengelolaan hutan lestari sudah dilakukan *reduce impact logging*, HCVF, dan dukungan sertifikasi FSC.

Meskipun kegiatan hibah ini berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, antara lain:

- 1) Pengelolaan pasca panen produk HHK, HHBK, dan Jaslink antara lain pengemasan dan pemasaran.
- 2) Menjaga komitmen para pihak dalam mengembangkan hasil program kerjasama melalui *Forclime*.
- 3) Penguatan kelembagaan lokal, tata kelola administrasi desa, dan meningkatkan investasi produktif.
- 4) Ketahanan pangan melalui investasi berbasis penanaman, demplot pertanian dan perikanan.
- 5) Implementasi pengelolaan Hutan Desa untuk meningkatkan profil ekonomi desa.

Adapun *exit strategy* dari kegiatan ini juga sudah dipersiapkan, yaitu bagaimana mengelola keberlanjutan hasil program *Forclime* untuk menciptakan dampak kemanfaatan, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat mitra melalui kegiatan diklat, *share learning*, dan sekolah lapang.
- 2) Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program *Forclime*.
- 3) Mendorong dukungan para pihak di daerah untuk berkontribusi dalam mengelola sumber daya.
- 4) Mengadopsi model-model kelola usaha kehutanan dan sumber daya alam dalam skema perhutanan sosial.
- 5) Mendorong adanya kelembagaan usaha kelola HHK, HHBK dan Jaslink dengan skema PS.

Forest Program III : Sulawesi Collaborative Integrated Management of The Lore Lindu Landscape, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah *Forest Program III* ini dibiayai oleh KfW dengan total dana sebesar EUR 13.500.000, dan akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) tahun dari 2017 sampai dengan 2023. Tujuan pelaksanaan kegiatan hibah ini adalah implementasi pengelolaan bersama dan terpadu *landsekap* Lore Lindu, serta mendukung pengembangan dan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam kerangka Strategi Nasional REDD+ di Sulawesi Tengah. Adapun kegiatan pokok dari hibah ini adalah pengelolaan kerjasama yang terpadu terhadap Bentang Alam Lore Lindu.

Executing agency dari kegiatan hibah adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan *implementing agency* yaitu:

- 1) Balai Besar TN Lore Lindu, Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- 2) Balai Pengelolaan DASHL Palu-Poso, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- 3) Balai PSKL wilayah Sulawesi, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan hibah *Sulawesi Collaborative Integrated Management of The Lore Lindu Landscape*, yaitu: a) perlunya dukungan terhadap upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, b) perlunya program integrasi pengelolaan DAS sebagai upaya alokasi pemanfaatan lahan, perencanaan tata ruang, dan perlindungan hutan dalam satu *landscape* ekologi, 3) Sulawesi Tengah memiliki *species endemic* dan keanekaragaman hayati yang tinggi, 4) TN Lore Lindu merupakan zona inti dari Cagar Biosfer Lore Lindu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka output yang diharapkan dari pelaksanaan hibah ini adalah:

- 1) Terjaganya keutuhan TN Lore Lindu dengan cara a) menjalin hubungan baik antara TN Lore Lindu dengan pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, b) mendukung upaya restorasi kawasan yang terdegradasi, c) memecahkan permasalahan perambahan secara partisipatif, d) penegakan hukum sebaik mungkin, e) monitoring keanekaragaman hayati.
- 2) Rehabilitasi hutan yang terdegradasi di Sub DAS Miu, Gumbasa, Wuno, Bambamua, dan Huku Lariang dengan cara a) meningkatkan target, aplikasi teknis, dan monitoring program yang dilaksanakan oleh BPDASHL Palu Poso, b) mendorong pembangunan hutan alam campuran yang sejalan dengan sasaran dan target Cagar Biosfer Lore Lindu dan TN Lore Lindu.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan TN Lore Lindu dan Cagar Biosfer Lore Lindu.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait.

Kegiatan hibah yang sudah berjalan selama satu tahun ini cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan, antara lain a) kegiatan dalam DIPA awal kurang sesuai dengan *Annual Work Plan* (AWP), sehingga diperlukan adanya revisi AWP maupun DIPA, dan b) proses *replenishment* membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pencairan terhambat.

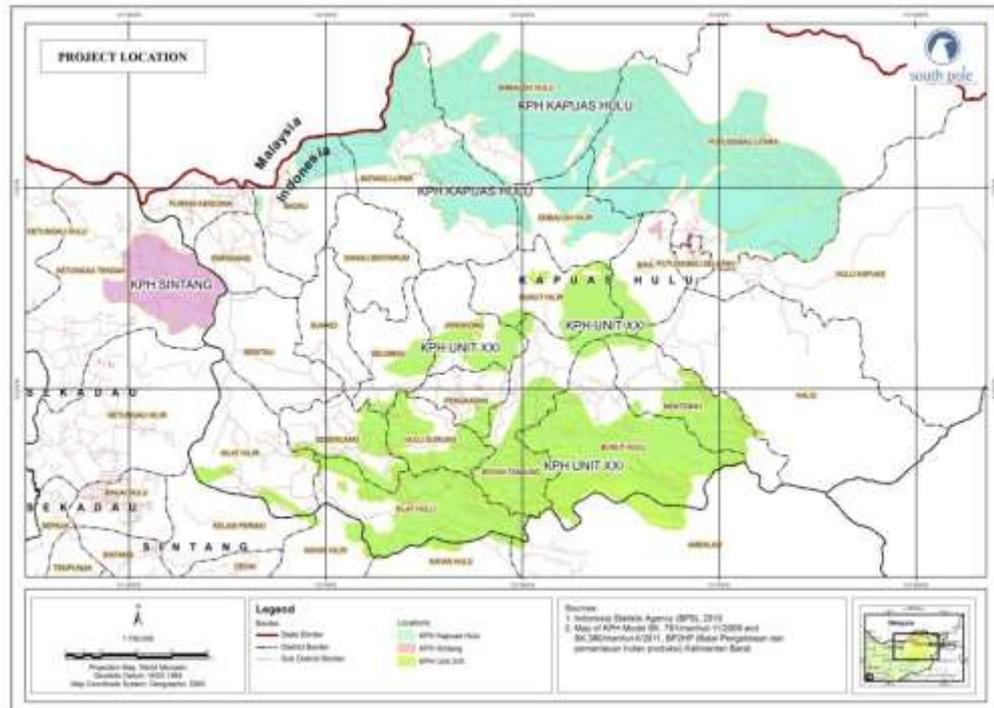
Hibah *Community Focused Investment to Address Deforestation and Forest Degradation*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Grant Agreement FIP 1 "*Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project*" sudah ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2016, dengan *Grant Number* 0501-INO (EF). Kegiatan hibah ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, sejak 2017 sampai dengan 2021, dengan dana senilai USD 17,5 juta. *Executing agency* kegiatan hibah ini adalah Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) melalui Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Adapun *implementing agency* kegiatan hibah terdiri dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.

Kegiatan hibah "Investasi Khusus bagi Masyarakat untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan" ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

- 1) Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari KPHP Kapuas Hulu, KPHP Persiapan Lot XXI, KPHK BT Kerihau Danau Sentarum, dan 13 desa (Rantau Prapat, Nanga Nyabau, Sibau Hulu, Sibau Hilir, Banua Tengah, Sungai Uluk Palin, Tanjung Lasa, Padua Mendalam, Batu Lintang, Bunut Hulu, Nanga Tuan, Tanjung Lokang, dan Bungan Jaya).
- 2) Kabupaten Sintang terdiri dari KPHP Sintang/Merakai, dan 4 desa (Radin Jaya, Tanjung Sari, Kayu Dujung, Senangan Kecil).

Gambar 3.3 Lokasi Kegiatan Hibah *Community Focused Investment to Address Deforestation and Forest Degradation*



Adapun output dari kegiatan hibah “*Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project*” ini meliputi:

- 1) Output 1: Terlaksananya “*Community-focused and gender response REDD+ pilots*” di 17 desa, di 4 KPH di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang. Kegiatan-kegiatan yang mendukung output ini adalah:
 - a) Percepatan regenerasi alami pada lahan terdegradasi seluas 6.000 ha.
 - b) Kegiatan *agroforestry* di lahan terdegradasi seluas 1.880 ha (dalam konteks PHBM).
 - c) Pencegahan kebakaran seluas 5.000 ha terutama TN BT Kerihun dan danau Sentarum melalui pengelolaan masyarakat peduli api, secara tidak langsung perlindungan lahan seluas 91.000 ha melalui perbaikan sistem pemanenan madu alam, dan teknik pengeringan ikan (usaha produktif masyarakat).
 - d) Kawasan hutan seluas 17.000 ha dirancang untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
 - e) Dukungan terhadap kegiatan REDD+ lainnya: *Home garden, solar panel, micro hydro, ecotourism, handicrafts, coffee and latex processing*, dan sebagainya.
- 2) Output 2: Terlaksananya strategi REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat secara efektif. Kegiatan-kegiatan yang mendukung output ini adalah:
 - a) Penguatan kapasitas staf di tingkat provinsi terhadap pemahaman konsep-konsep REDD+, monitoring dan pelaporan REDD+, penyiapan *business plan* bagi KPH dan draf peraturan REDD+ dan perhitungan karbon.
 - b) Membangun dan menghubungkan mekanisme pengaduan dan pembagian keuntungan provinsi secara luas dengan KPH dan sistem nasional.
 - c) Membuat sistem informasi *safeguards* dan monitoring REDD+ di tingkat provinsi.
 - d) Membentuk mekanisme penanganan keluhan pada kepemilikan dari kegiatan REDD+.
- 3) Output 3: Terharmonisasikannya kebijakan fiskal REDD+ daerah dengan kebijakan nasional. Kegiatan-kegiatan yang mendukung output ini adalah:
 - a) Menganalisis kebijakan fiskal untuk integrasi pertimbangan sumber daya alam dalam upaya memberikan panduan kebijakan kepada pemerintah nasional dan daerah.
 - b) Melakukan dialog kebijakan untuk menilai kesenjangan fiskal, kebijakan pemantauan dan pembagian keuntungan Kalimantan Barat, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk harmonisasi kebijakan yang efektif.
 - c) Mengidentifikasi sumber pendanaan untuk pelaksanaan REDD+ dan pelatihan untuk mempersiapkan usulan perluasan ruang lingkup daerah dan/atau kerangka waktu proyek ini.

Meskipun pelaksanaan kegiatan hibah baru dimulai, namun tantangan atau permasalahan yang potensial menjadi penghambat sudah bisa diidentifikasi, yaitu:

- a) Restrukturisasi KPH secara nasional berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, khusus Provinsi Kalimantan Barat perlu ada penetapan kembali Menteri, karena terjadi perubahan luas, bentuk terhadap SK penetapan awal. Konsekuensi: alokasi kegiatan pengembangan KPH pada direktorat KPHP dan UPT BPHP Kalimantan Barat belum dapat dilaksanakan khususnya untuk kegiatan yang terkait dengan lapangan/tapak.
- b) Waktu efektif pelaksanaan proyek untuk 2017 tersisa 1,5 bulan, sedangkan pelaksana proyek belum familiar dengan sistem administrasi kegiatan berbantuan hibah LN.

Hibah *Support to Indonesia's Climate Change Response Technical Assistance Component*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hibah *Support to Indonesia's Climate Change Response Technical Assistance Component* (SICCR-TAC) bertujuan memberikan kontribusi terhadap pencapaian strategi nasional pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Selain itu, kegiatan hibah SICCR-TAC juga bertujuan merancang strategi untuk menghasilkan pengalaman yang bernilai serta berbagi pelajaran dari pelaksanaan REDD+ di tingkat daerah ke tingkat nasional dan dunia internasional.

Hibah SICCR-TAC berasal dari Uni Eropa senilai EUR 6,5 juta, dan merupakan hibah jasa langsung, dengan durasi pelaksanaan dari Januari 2016 sampai dengan Januari 2019. *Executing agency* kegiatan hibah ini adalah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, dan *implementing agency* adalah Sekjen Pengendalian Perubahan Iklim. Lokasi kegiatan hibah adalah di Jakarta dan Aceh.

Di tingkat pusat, hibah dilaksanakan oleh GIZ bersama AHT Group dan SNV dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Sedangkan Pemerintah Aceh yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi menjadi mitra utama di tingkat lokal.

Hibah *Support to Indonesia's Climate Change Response Technical Assistance Component* dilaksanakan dengan konsep sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kapasitas Pemerintah Aceh dalam upayanya menuju pembangunan ekonomi rendah karbon dan rendah emisi dalam sektor pemanfaatan lahan, perubahan lahan dan kehutanan.
- b) Memperkuat kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit lokal untuk pengelolaan hutan berkelanjutan di Aceh.
- c) Mendukung pengembangan kapasitas Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d) Memperkuat kapasitas Balai PPI yang mewakili Ditjen PPI di tingkat daerah, terutama Balai PPI wilayah Sumatera.

Hibah SICCR-TAC terdiri dari tiga komponen kegiatan yang ditujukan agar Provinsi Aceh dapat berkontribusi secara efektif dan selaras terhadap strategi REDD+ nasional melalui penyelarasan strategi REDD+ provinsi dengan kerangka pembangunan yang telah ada, serta melaksanakan dan memantau keputusan penggunaan lahan secara berkelanjutan, partisipatif, transparan, rendah karbon dan ekonomis. Ketiga komponen kegiatan hibah tersebut adalah:

- a) Konsensus dan kapasitas para pemangku kepentingan meningkat. Capaian dari komponen I ini adalah sebagai berikut :
 - Penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas (*Capacity Development Needs Assessment*) untuk KPH dan Balai PPI telah dilaksanakan.
 - Aktifitas penguatan kapasitas KPH yang telah dilakukan, antara lain:
 - Pelatihan re-orientasi dan integrasi PNS eks Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota menjadi KPH.
 - Pemetaan dan pelatihan pengelolaan dan penanganan konflik tenurial.
 - Pelatihan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) selama dua bulan di Pusdiklat Reskrim Bogor yang diikuti 29 personil dari 7 KPH dan 1 staf Ditjen Penegakan Hukum KLHK.
 - *Workshop* Persiapan Pengembangan Kapasitas Balai PPI diikuti 5 (lima) Balai menghasilkan *roadmap* rencana pengembangan Balai.
 - Pembuatan film tentang kearifan lokal yang berkaitan dengan perubahan iklim (dalam proses tender).

- b) Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) di tingkat provinsi tertata dan informasi untuk perencanaan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau tersedia. Capaian dari komponen II ini meliputi:
- Laporan studi dan penilaian yang telah dihasilkan dan sedang dalam proses cetak, yaitu:
 - *Ecotourism*.
 - *Review and Alignment of REDD+ and LULUCF Policies in Indonesia (National Level and Aceh Province)*.
 - *Alternatives to Leuser Geothermal Development*.
 - *Value Chain Approach: Instrument for Developing Green Economy Policy and Its Implementation*.
 - *An Assessment of Village Funds: Creating Fiscal Incentive Mechanism in Aceh Province*.
 - *Aceh Renewable Energy Assessment*.
 - Pelatihan GIS untuk KPH dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh tentang pengelolaan *database* dan sumber data tata ruang.
 - KPH telah menyusun rancangan awal *roadmap* Tingkat Emisi Hutan Provinsi (FREL) setelah pelaksanaan *workshop* FREL di Aceh pada bulan Maret 2017.
 - Diskusi perumusan sistem MRV Provinsi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan Tim RPJMA.
- c) Investasi baru dan inisiatif pembangunan hijau terbentuk. Capaian dari komponen III ini terdiri dari:
- Pendampingan proses penyusunan *Green* RPJMD dengan Kabupaten Pidie.
 - *Piloting* penyusunan *Green* Perencanaan Desa di dua desa Kabupaten Pidie yang berbatasan dengan wilayah KPH, yaitu Desa Alue Lada dan Desa Peunalom II.
 - FGD penyusunan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Desa untuk Mekanisme Insentif Fiskal
- Realisasi anggaran dari kegiatan hibah *Support to Indonesia's Climate Change Response Technical Assistance Component* sampai dengan dengan akhir 2017 diperkirakan mencapai EUR 1.000.000 dari total anggaran sebesar EUR 6.498.000. Adapun tantangan yang masih harus dihadapi dalam pelaksanaan hibah ini, antara lain:
- a) Di tingkat pusat, yaitu pengembangan kapasitas Balai PPI dan Karhutla, percepatan kegiatan dan realisasi anggaran, serta proporsi alokasi anggaran.
 - b) Di tingkat lokal, yaitu pergantian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, dan sebagian jajarannya membutuhkan koordinasi ulang antara proyek dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, kapasitas SDM KPH memerlukan re-orientasi karena merupakan limpahan personil dari Dinas Kehutanan kabupaten/kota.

Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Hibah SICCR-TAC



Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Hibah dari ADB senilai USD 1,5 juta ini mulai efektif sejak 19 Juni 2013 dan berakhir pada 30 Juni 2017, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi: i) Harmonisasi ADB's *Safeguard Policy Statement* dengan *Safeguards System* di Indonesia; ii) Harmonisasi prosedur pengadaan (*procurement system*) antara ADB dengan Indonesia; iii) Penguatan persiapan proyek; dan iv) Pembangunan kapasitas (*capacity building*). Kegiatan hibah ini dilaksanakan bersama oleh beberapa instansi, yaitu: 1) Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan – Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral; 2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta 4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN.

Kegiatan hibah ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem peraturan pemerintah Indonesia dan ADB untuk meningkatkan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui analisis peraturan pemerintah dan ADB, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Workshop*, identifikasi gap, dan penyusunan *action plan*.

Output yang diharapkan dari TA 8548-INO ini adalah: i) *Country Safeguard Systems* (CSS); ii) Harmonisasi pengadaan barang/jasa; iii) Peningkatan kesiapan kegiatan dan *start-up*; serta iv) Peningkatan kapasitas. Adapun *outcome* yang diharapkan yaitu keselarasan sistem ADB dan Pemerintah dalam proses persiapan dan pelaksanaan proyek, sehingga memberi dampak (*impact*) berupa meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam persiapan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai ADB di Indonesia.

Meskipun kegiatan hibah ini sudah berakhir, namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut hasil kegiatan, yaitu:

- 1) Penggunaan *Country Safeguard System* (SCC) dengan *piloting* PT. PLN untuk kegiatan yang akan dibiayai melalui ADB.
- 2) Penggunaan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengembangan SBD untuk *International Competitive Bidding* (ICB) dengan *piloting* Kementerian PUPR.
- 3) Penggunaan panduan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target.
 - Panduan Pengusulan dan Peningkatan Kesiapan Kegiatan yang Didanai Pinjaman Luar Negeri berisi:
 - Alur proses perencanaan kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengusulan pinjaman, peningkatan kesiapan kegiatan, dan penyusunan Daftar Kegiatan.
 - Contoh-contoh dokumen yang dibutuhkan
 - Tujuan panduan yaitu:
 - Menjadi acuan bersama, baik oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga pengusul, maupun mitra pembangunan (*piloting* ADB), dalam proses penyiapan dan pengusulan kegiatan yang akan dibiayai melalui sumber pendanaan luar negeri (ADB) sehingga kegiatan berjalan secara efisien dan tepat sasaran.
 - Seluruh pemangku kepentingan dapat memahami proses pengusulan kegiatan dan pemenuhan kriteria kesiapan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, khususnya ADB.
 - Menjadi acuan untuk pengembangan proses internal (SOP) yang lebih optimal dan sinergis antara seluruh pemangku kepentingan.
 - *Pilot* kerjasama dengan mitra pembangunan multilateral dalam rangka harmonisasi sistem dan aturan pemerintah dan mitra pembangunan.
 - Memastikan *better quality at entry* untuk mitigasi potensi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sustainable Infrastructure Assistance Program, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Hibah *Sustainable Infrastructure Assistance Program* merupakan hibah yang berasal dari Pemerintah Australia (DFAT) yang diadministrasikan melalui ADB senilai USD 17,4 juta. Hibah ini dilaksanakan sejak 17 Juni 2013 dan akan berakhir pada 30 Juni 2019. Instansi pelaksana hibah adalah Direktorat Transportasi – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pengelolaan hibah ini dilakukan melalui *steering committee* yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Bappenas), Pemerintah Australia (DFAT), dan ADB.

Lingkup kegiatan dalam hibah ini terdiri dari *Technical Assistance* (TA) dan *Capacity Building* untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan infrastruktur kota lainnya (sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi, dan energi). Total TA yang berjalan adalah 9 (sembilan) TA, termasuk 3 (tiga) TA baru dan 2 (dua) TA yang sudah selesai dilaksanakan. Ketiga TA baru yang efektif di tahun 2016, yaitu:

- 1) TA 9116 INO: *Improving Multimodal Connectivity to Support Integrated Land and Sea Tollway.*
- 2) TA 9113 INO: *Strengthening Verification in Result-Based Programs in Indonesia's Power Sector.*
- 3) TA 9109 INO: *Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery.*

Adapun TA yang sudah selesai dilaksanakan adalah TA 8506 INO: *Scaling up Hydro Development* dan TA 8508 INO: *IKK Water Supply Project*. TA lainnya yang sudah berjalan adalah:

- 1) TA 8484 INO: *Cluster Management Facility.*
- 2) TA 8518 INO: *Green Cities.*
- 3) TA 8530 INO: *Community Participation RRDP.*
- 4) TA 8666 INO: *MSMIP CDTA.*

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan hibah ini, ADB sudah melakukan reviu dan menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada anggota *steering committee* untuk dimintakan tanggapan

Asean Regional Integration Support - Indonesia Trade Related Assistance (ARISE PLUS Indonesia), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

ARISE Plus Indonesia merupakan program hibah Uni Eropa berjangka waktu lima tahun yang bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekspor dan integrasi ke dalam rantai nilai global.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai mitra dagang. Meskipun Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, menurut data statistik ASEAN tahun 2017, perdagangan barang Indonesia Uni Eropa hanya mencapai 11,2% dari total perdagangan barang antara Uni Eropa dengan ASEAN. Demikian pula, investasi Uni Eropa di Indonesia hanya sebesar 1,6% dari total investasi Uni Eropa di Asia dan hanya 6% dari total di ASEAN. Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Vietnam, Malaysia dan Thailand.

Program ARISE Plus Indonesia, yang akan berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023, memberi prioritas pada peningkatan 4 bidang berikut:

- 1) Kebijakan Perdagangan dan Investasi
- 2) Fasilitasi Perdagangan
- 3) Infrastruktur Kualitas Ekspor
- 4) Indikasi Geografis (IG) dan dukungan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Program ini akan fokus pada empat kategori produk potensial untuk ekspor ke Uni Eropa dan pasar global, yaitu *agri-food*, perikanan, produk kayu dan kosmetik.

ARISE Plus Indonesia menawarkan pendekatan fleksible untuk memfasilitasi tanggapan cepat terhadap isu-isu yang muncul dari proses negosiasi serta fase awal dari implementasi CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif). Program ARISE Plus Indonesia akan mendukung penguatan kapasitas bagi kementerian dan lembaga terkait dengan proses negosiasi, kegiatan berbagi pengetahuan maupun sosialisasi dan komunikasi hasil-hasil CEPA di tingkat nasional dan daerah.

Program ARISE Plus Indonesia akan bekerjasama dengan sembilan kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai koordinator program, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Hibah ARISE PLUS Indonesia



Combating Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species di Indonesia/Illegal Wildlife Trade, Kementerian Pertanian

Perdagangan ilegal flora dan fauna (selain perikanan dan kayu) diperkirakan bernilai USD 7-23 miliar. Perdagangan ini menyebabkan penurunan dan kepunahan lokal banyak spesies di Asia Tenggara, termasuk di dalam area yang dilindungi. Perdagangan ilegal ini dimulai dari Indonesia, satu dari sepuluh "megadiverse" terbesar di dunia. Indonesia juga menjadi titik transit penting untuk perdagangan ilegal satwa liar dari Afrika ke Indonesia dan Asia Timur. Perdagangan ilegal satwa liar adalah ancaman utama terhadap Badak Sumatera, Harimau Sumatera, Gajah Asia dan Sunda Pangolin. Konsekuensi dari perdagangan ilegal satwa liar yang tidak berkelanjutan adalah ancaman besar secara global.

Upaya untuk memerangi perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia terhalang oleh kurangnya minat dan kolaborasi yang buruk di antara lembaga penegak hukum, kurangnya pemahaman tentang hukum, dan prosedur penegakan hukum, serta adanya celah peraturan dan ketidakkonsistenan. Adapun faktor sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan ancaman perdagangan ilegal satwa liar adalah pertumbuhan populasi dan kemiskinan di zona batas wilayah daerah yang dilindungi, dan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk melakukan pertanian berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, UNDP merancang intervensi proyek untuk mengurangi volume perdagangan satwa liar yang tidak berkelanjutan. Proyek ini secara khusus membahas ancaman yang ditimbulkan oleh perdagangan ilegal satwa liar yang tidak berkelanjutan untuk spesies yang terancam punah di Indonesia.

Selain beberapa hibah tersebut diatas, dalam triwulan ini juga disampaikan laporan proyek-proyek hibah lainnya, meskipun pelaporannya belum menyertakan uraian tentang capaian kinerja dari masing-masing proyek. Hibah luar negeri seluruhnya yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan III Tahun 2018 berjumlah 95 proyek, yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 1.898,7 juta. Pemanfaatan Hibah Luar Negeri tersebut sebagian besar diarahkan untuk mendukung penanganan lingkungan hidup dan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, kependudukan, pertanian, mitigasi bencana, dan juga peningkatan kapasitas (*capacity building*). Beberapa hibah juga merupakan hibah yang menyertai pinjaman.

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga tersebut, dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu hibah terencana, hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dan hibah langsung dalam bentuk uang.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri (berdasarkan Bentuk dan Jenis)

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
Hibah Terencana					
Kementerian Pertanian					
1	71697101	IFAD	<i>Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesian</i>	05/06/2011 - 31/07/2019	1,1
2	200001446	IFAD	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i>	13/02/2017 - 31/03/2023	1,5
3	200000195	IFAD	<i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI)</i>	05/06/2011 - 31/07/2019	1,0
Kementerian PPN/Bappenas					
1	8548-INO	ADB	<i>Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance (ACSIP)</i>	19/06/2013 - 30/06/2018	1,5
2	0013-INO	ADB	<i>Sustainable Infrastructure Assistance Program (SIAP)</i>	17/06/2013 - 30/06/2019	21,6
3	N/A	Uni Eropa	<i>Asean Regional Integration Support – Indonesia Trade-Related Assistance (ARISE+ INDONESIA)</i>	N/A	10,0
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
1	201267004	KfW	<i>Forest Programme III</i>	28/11/2016 – 31/12/2023	16,6
2	0510-INO	ADB	<i>Community-Focused Investments to Address Deforestation and Degradation Project (Forest Investment Program/FIP-1)</i>	06/12/2016 - 30/06/2022	17,0
3	200766089	KfW	<i>Forest Programme I</i>	19/10/2011 – 30/12/2020	24,7
4	N/A	Uni Eropa	<i>Support to Indonesia's Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC)</i>	06/2016 - 01/2019	7,57
Hibah Langsung Barang/Jasa atau Surat Berharga					
Badan Teknologi Nuklir Nasional					
1	N/A	IAEA	Hibah Jasa	N/A	0,0
Badan Nasional Penanggulangan Bencana					
1	26EN9YQA	<i>Government of The Commonwealth of Australia</i>	<i>Australia Indonesia Partnership on Disaster Risk Management</i>	01/01/2016 - 31/12/18	8,0
Badan Pengawas Obat dan Makanan					
1	2Q55U2FA	<i>United States Agency of Int. Dev. (USAID)</i>	<i>Implementation of Intermediate Results 2.1 and 3.1 of USAID</i>	N/A	216,5
2	27TVWY8A	JICA	<i>Project for Ensuring Drug and Food Safety In The Republic of Indonesia</i>	29/11/2016 - 29/11/2016	413,8
Kementerian Agraria dan Tata Ruang					
1	2TR96L2A	Bank Dunia	<i>Impact Assessment and Technical Validation for the Acceleration Program of One Map Policy Implementation (P1060661) Project</i>	12/07/2018 - 31/05/2019	0,6

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
Kementerian Kesehatan					
1	2MNLNTDA	FHF	HIV Testing and Treatment Program	01/09/2016 - 09/2019	2,1
2	N/A	CBM	Christoffel Blinden Mission (CBM)	12/09/2017 - 01/10/2020	0,0
3	2E6AZTKA	Global Fund to Fight AIDS Tuberculosis and Malaria	Indonesia HIV Response: Accelerating the Achievement of the Three Zeros	11/02/16 - 31/12/20	22,15
Kementerian Keuangan					
1	24DE98GA	IBRD	Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (InIFD)	25/04/2016 - 31/12/2020	8,28
2	2UL5W29A	ADB	Promoting Innovative Financial Inclusion (PIFI)	18/09/2017 - 30/06/2019	0,8
3	2H816GHA	Bank Dunia	Public Financial Management Multi Donor Trust (PFM-MDTF) II	21/03/2016 - N/A	2,7
4	2H816GHA	Bank Dunia	Public Financial Management Multi Donor Trust (PFM-MDTF)	21/03/2016 - N/A	0,0
5	2UL5W29A	ADB	Promoting Innovative Financial Inclusion (PIFI)	N/A	8,0
6	2Q36JPE4	UNDP	Sustainable Development Financing	N/A	6,2
7	N/A	UNDP	Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)	N/A	10
8	71484001	AIPEG	Government Partnership Fund (GPF) Phase II	N/A	5,8
9	905001	JICA	Project for Enhancing Tax	14/07/14 - 30/06/18	0,1
Kementerian Pertanian					
1	2HHFZ6PA	JICA	The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System	09/2015 - 12/2019	0,5
2	71465701	AusAID	Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program (AIP-EID)	18/01/2011 - 03/12/2018	20,9
3	29RLUFDA	Government of New Zealand	Indonesia-New Zealand Dairy Excellence Activity	10/09/15 s/d 10/09/23	5,0
4	2CFTEZHA	FAO	Strengthening National Capacity to Prevent and Control Emerging and Re-emerging Pandemic Treats Including Influenza A in Indonesia (OSRO/INS/501/USA)	01/01/2016 - 30/04/2019	16,0
5	2WTVSDDA	United Nation World Food Programme (UN-WFP)	Supporting Government of Indonesia to Collect and Analyse Data on Food Security and Nutrition to Optimize Policies and Programs	28/11/2017 - 31/12/2020	1,2
6	2N942GRA	COMCEC	Developing Agricultural Market Information System for Hortikulture Farmers	01/06/2018 - 31/01/2019	0,1
7	2WYHAU15	UNDP	Sustainable Palm Oil Initiative	10/2014 - 12/2018	15,5
Kementerian PPN/Bappenas					
1	71125701	USAID	Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA)	05/01/2017 s/d 04/01/2020	2
2	2VBMKB3A	Pemerintah Australia	Program KOMPAK	14/12/2015 - 30/06/2022	144,3
3	2Y9QWFUA	DFAT	Australia - Indonesia Partnership for Gender	25/06/2017 - 30/06/2020	36,1
4	71125701	USAID	Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance	16/02/2017 -	2,0

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
			(SCAA)	04/04/2020	
LIPI					
1	2RWH2XHA	JICA	The SATREPS Project for Producing Biomass Energy and Material through Revegetation of Alang-alang (<i>Imperata Cylindrica</i>) Fields	21/03/2018 - N/A	0,7
Hibah Langsung/Uang					
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional					
1	27KR7AMA	UNFPA	CP-9 UNFPA- BKKBN	12/02/2018 - 12/2018	0,2
Badan Pusat Statistika					
1	2KC5N9AA	UNICEF	Country Program Action Plan 2016-2020	19/02/2016 - 31/12/2020	0,3
2	2AB9MTXA	UNFPA	UNFPA Siklus ke-9	01/01/2016 - 31/12/2020	0,1
3	72205701	ADB	International Comparison Program (ICP) RDTA 7507	22/01/2016 - 12/2017	0,0
Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi					
1	0343-INO	ADB	Polytechnic Education Development Project (PEDP)	27/02/2014 - 31/12/2019	4,9
Kementerian Keuangan					
1	TF 0A2268	IBRD	Indonesia Infrastructure Finance Development	25/04/2016 - 31/12/2016	82,8
2	21SRT4Y3	ADB	Strengthening Knowledge Sharing in Indonesia	19/12/14 s/d 31/12/17	0,7
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
1	2AHFU6NL	KfW	Biodiversity Conservation And Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem	25/11/2014 - 31/12/2019	9,9
Kementerian Pertanian					
1	2YYMH8ZA	ACIAR	Improving Milk Supply, Competitiveness and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia	13/06/2016 - 31/05/2020	0,4
2	2XLRA8XA	Asia Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)	Asia Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) project in Indonesia	01/01/2018 - 31/07/2019	0,9
3	72818801	ACIAR/ Australia	Increasing Productivity of Allium and Solanaceous Vegetable Crops in Indonesia and Sub-tropical Australia	01/04/2012 - 06/2018	1,6
4	74680201	FAO	Reducing Disaster Risks Caused by Changing Climate in Nusa Tenggara Timur (NTT) and Nusa Tenggara Barat (NTB) Provinces in Indonesia	01/01/2015 - 06/2018	36,5
5	2881RS8E	ACIAR	Integrating Herbaceous Forage Legumes into Crop and Livestock Systems in East Nusa Tenggara, Indonesia	01/05/2014 - 30/04/2018	1,9
6	2E3ZD2QP	ACIAR	Improving Market Integration for High Value Fruit and Vegetable Production Systems in Indonesia	01/03/2014 - 28/02/2018	1,7
7	2K5KVXJQ	ACIAR	Integrated Disease Management of Sugarcane Streak Mozaic in Indonesia	01/10/2014 - 31/12/2018	0,4

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
8	2W8R7VVG	ACIAR	<i>Improving Soil and Water Management and Crop Productivity of Dryland Agriculture Systems of Aceh and NSW (SMCN/2012/103)</i>	01/05/2014 - 28/02/2018	1,4
9	2AH9JM5A	<i>Research Council of Norway</i>	<i>Biochar as an Adaptation Strategy for Climate Change</i>	01/09/2015 - 30/09/2018	0,8
10	2CGN1NA	<i>The University of Queensland</i>	<i>BBTV Mitigation: Community Management in Nigeria and Screening Wild Banana Progenitors for Resistance</i>	20/09/2017 - 30/04/2021	1,2
11	2CFGND5A	<i>Arcadia Bioscience, Inc</i>	<i>Limited Field Trial on Rice Nitrogen Use Efficiency (NUE) Under Rainfed Lowland Ecosystems in Indonesia</i>	01/03/2013 - 31/03/2018	1,4
12	2KCVV5A	FAO	<i>Multicountry Construction of a Test Platform for the Development and Allocation of Globally Unique Identifiers for Rice Germplasm, Linking the MLS Information Infrastructure and the DivSeek</i>	21/06/2016 - 21/06/2019	3,6
13	29Q1X59A	FAO	<i>Co-development and Transfer of Rice Technologies</i>	21/06/2016 - 21/06/2019	4,2
14	233T6GKA	FAO	<i>Analysis and Mapping of Impacts under Climate Change for Adaptation and Food Security through South-South Cooperation (AMICAF-SSC)</i>	05/06/2016 - 07/2018	0,8
15	2YYMH8ZA	ACIAR	<i>Improving Milk Supply, Competitiveness and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia</i>	13/06/2016 - 31/05/2020	0,5
16	2NQF4TMA	OCP S.A Morocco	<i>Improving Soil Fertility and Crop Production through Direct Application of Reactive Phosphate Rock</i>	01/2017 - 29/11/2018	2,3
17	2HJ9J1NA	ACIAR	<i>Profitable Feeding Strategies for Smallholder Cattle in Indonesia</i>	09/01/2017 - 31/12/2020	7,2
18	2251NT3A	CIAT and IFPRI	<i>Harvest Plus Program</i>	20/04/2017 - 20/04/2018	0,6
19	2793QR9A	<i>Michigan State University (MSU)</i>	<i>Feed the Future Biotechnology Partnership</i>	04/05/2017 - 09/2020	2,4
20	23X88TYA	<i>Agricultural Science and Technology Indicator (APAARI)</i>	<i>Agricultural Science and Technology Indicators (ASTI)</i>	21/05/2018 - 31/12/2019	0,6
21	23ZPYAJA	AgResearch	<i>Administration of Global Research Alliance Funding by the New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre: Institutional Strengthening in South East Asia for Mitigating Livestock Methane Emissions</i>	11/05/2018 - 30/06/2021	1,2
Kementerian PPN/Bappenas					
1	2JCK3X5Q	DANIDA	<i>Dukungan Environmental Support Programme Phase III (ESP-3) Kepada Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)</i>	12/02/2018 - 31/12/2018	0,2

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
2	2MFFVJHA	Government of The United Kingdom of Great Britain and North IR (UKCCU)	Forest And Peatland Management To Reduce Emission In Indonesia through Local Actions	05/04/2016 - 31/03/2019	3,9
3	25LYR55M	USAID	Usaid Support for Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)	19/06/2015 - 31/12/2019	5,0
4	21680201	JICA	Professional Human Resources Development (PHRD) IV	23/06/2014 - 23/06/2023	6,2
5	72200201	MCC	Program Compact	02/04/2013 - 01/04/2018	600,0
6	2LV9UC9A	UNFPA	Program Kerjasama Programme Nine 2016-2020 (Programme of Cooperation between the GOI - UNFPA)	26/03/16 s/d 31/12/20	2,3
7	2XFJZUTA	UNICEF (United Nations Children's Fund)	Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF, periode 2016-2020	N/A	17,5
Kementerian Kelautan dan Perikanan					
1	24QQFBA	ACIAR	Accelerating the Development of Finfish Marine Culture in Cambodia through South South Research Cooperation with Indonesia	01/09/2017 - 30/06/2021	0,1
2	24Y36R2A	ACIAR	Research for Development of Lobster Growout Technology In Indonesia	01/07/2015 - 30/06/2019	0,4
3	23X3H6RA	ACIAR	Improving Seaweed Production and Processing Opportunities in Indonesia	25/07/2016 - 31/07/2020	0,0
4	2Z5GG3BA	N/A	Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use Into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystem of High Conservation Value (iFish)	22/02/2017 - N/A	6,2
5	2PG6AJQA	N/A	The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation on Abandoned Oil and Gas Platform	25/07/2017 - 25/07/2019	0,1
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia					
1	2VHRHNZA	United Nations Population Fund	Gender Equality and Women's Empowerment	29/03/2016 - 31/12/2018	0,2
2	74858801	Government of The Commonwealth of Australia	Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU/AUSAID)	08/01/2016 - 31/03/2020	1,8
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional					
1	2KDWR12A	International Council for Science, Regional Office for Asia and The Pacific	International Council for Science	02/04/2018 - 03/2018	0,0

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
1	25HTPDXA	Intel Foundation	National Youth Science Competition	9/3/2018 - 31/3/2018	0,0
2	2QV34BNA	Society for Science and The Public	2018 Broadcom Masters International Affiliation Agreement Youth Science	2/3/2018 – N/A	0,0
3	2BRA1SXA	ICSU – INGSA (The International Network for Government Science Advice)	INGSA Research Associates Grant Programme 2018	27/04/2018 - 19/04/2019	0,0
4	2K4B84RA	The Royal Botanic Gardens, KEW	Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project Indonesia	22/03/2017 - 13/12/2021	0,0
5	26Y2DWQA	JETRO	International Migration of Indonesian Nurses	21/06/2018 - 01/03/2019	1,4
6	2KMKRKHA	The Australian Plant Biosecurity Science Foundation (APBSF), The Crawford Fund	Bilateral Workshop on Biosecurity and Biosafety 2018	06/08/2018 - 31/08/2018	0,0
7	2Z5J362A	The National Institutes for The Humanities Jepang	Human-Environmental Security in Asia-Pacific Ring of fire : Water-Energy-Food Nexus	15/008/2017 - 28/02/2018	0,9
8	2BLYQHVA	UNESCO	Masterclass Series on Coastal and Marine Resources Management for Sustainable Development	14/12/2017 - 31/05/2018	0,0
9	2XZS961A	Nanyang Environment and Water Institute, Nanyang Technological University Singapore	Project Improving the Quality of Life in Giriharja Tofu Production Community through Biogas Production from Tofu Wastewater	01/01/2016 - 31/12/2017	0,1
10	289QPBCA	UNESCO	Enhance the Capacity for Species Identification and Genetic Analysis on Marine Organisms in the Coral Reef Ecosystems in the Western Pacific – Second Phase (DRMREEF-II)	03/08/2017 – 2018	0,0
11	24VRQZTA	Posco TJ Park Foundation, Korea Selatan	From Entrepreneurship to Social Activist: Self-Transformation and Theorizing Socio-Economic Reintegration of Indonesian Return Migrant from South Korea	06/07/2017 - 19/06/2018	0,0
12	10881901	ADB	Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI)	05/06/2014 - 31/12/2020	30,0

DAFTAR PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2018 BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
									Target	Realisasi	%
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan						57,8	56,4	1,4	10,1	8,2	81,1
<u>Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan</u>											
1	2927-INO	ADB	Strengthening Accountability Revitalization Project (STAR)	19-02-2013	31-03-2019	57,8	56,4	1,4	10,1	8,2	81,1
Badan Pengusahaan Batam						48,1	13,9	34,2	2,3	4,3	100,0
2	INA-20	Korea	Development of Sewerage System in Batam Island Project	29-12-2014	29-06-2019	48,1	13,9	34,2	2,3	4,3	100,0
Kementerian Agama						123,8	2,2	121,6	61,6	0,7	1,2
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam</u>											
3	IND-0164	IDB	The Support to Development of The Islamic Higher Education Project (4 in 1)	18-05-2013	10-11-2018	123,8	2,2	121,6	61,6	0,7	1,2
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional						200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
4	8897-ID	Bank Dunia	Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project)	26-10-2018	31-10-2023	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						518,1	373,6	144,5	96,0	25,7	26,8
<u>Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>											
5	755-ID	IFAD	Village Development Programme	17-03-2009	31-12-2018	68,1	62,5	5,6	5,7	3,6	63,2
6	8217-ID	Bank Dunia	Village Innovation Project	22-03-2013	31-12-2018	450,0	311,2	138,9	90,3	22,1	24,5
Kementerian Ketenagakerjaan						2,5	1,3	1,2	1,1	0,4	36,8
<u>Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktifitas</u>											
7	IND-0159	IDB	Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project	23-12-2013	30-06-2019	2,5	1,3	1,2	1,1	0,4	36,8

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
									Target	Realisasi	%
Kementerian Komunikasi dan Informatika						55,9	55,4	0,5	0,0	0,0	0,0
<u>Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika</u>											
8	21686401	Perancis	Improvement on TV Transmitting Stations (IITS) - Phase II	31-12-2014	15-12-2018	55,9	55,4	0,5	0,0	0,0	0,0
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						6.404,5	2.113,3	4.291,3	825,7	414,0	50,1
<u>Sekretariat Jenderal</u>											
11	3455-INO	ADB	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	21-12-2016	30-06-2020	148,2	2,3	145,9	28,7	1,3	4,5
<u>Direktorat Jenderal Bina Marga</u>											
12	IDN-1012	IDB	Development of Trans South-South Java Road Project	07-11-2017	07-11-2021	15,0	0,0	15,0	11,7	0,0	0,0
13	2817-INO	ADB	Regional Road Development Project (RRDP)	31-07-2012	30-11-2018	180,0	155,8	24,2	29,2	24,3	83,3
	IND-0161	IDB	Regional Road Development Project (RRDP)	29-04-2013	10-06-2019	65,0	33,2	31,8	7,6	9,3	100,0
14	201542 TTL 385	RR Tiongkok	Toll Road Development of Balikpapan-Samarinda Section 5 Project	30-09-2016	30-09-2021	53,4	12,1	41,3	10,9	5,1	47,0
15	2016 1 TTL 389	RR Tiongkok	Toll Road Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) Phase II	30-09-2016	30-09-2022	219,4	86,8	132,6	67,0	49,5	73,9
16	2016 7 TTL 395	RR Tiongkok	Toll Road Development of Manado-Bitung	30-09-2016	30-09-2022	78,1	30,0	48,1	52,1	18,0	34,6
17	21663301	RR Tiongkok	Toll Road Development of Medan - Kualanamu	11-03-2013	11-03-2018	122,4	99,5	22,9	0,0	0,0	0,0
18	201539 TTL 382	RR Tiongkok	Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase I Project	30-09-2016	30-09-2021	198,8	131,5	67,3	82,6	72,0	87,2
19	8043-ID	Bank Dunia	Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)	12-03-2012	31-12-2018	250	188,4	61,6	32,6	20,6	63,1
<u>Direktorat Jenderal Cipta Karya</u>											
20	8259-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	02-08-2013	30-11-2018	99,9	95,8	4,1	19,7	14,7	74,8

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
									Target	Realisasi	%
21	2010 66 471	Jerman (Kfw)	Emission Reduction in Cities : Solid Waste Management	02-05-2013	30-06-2018	87,4	11,8	75,6	0,6	0,0	0,0
22	HS002 16000	Hongaria	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Areas	01-08-2016	03-08-2020	36,4	23,8	12,6	5,5	4,6	83,6
23	2654-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	22-11-2010	31-12-2019	35,0	22,1	12,9	4,1	0,0	0,0
24	IP-565	Jepang (JICA)	Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta	23-06-2014	23-06-2021	17,3	2,9	14,4	6,4	1,6	25,0
25	3123-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09-07-2014	31-12-2020	80,0	2,1	77,9	10,5	0,5	4,8
	8280-INO	AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09-07-2014	31-12-2020	40,0	0,0	40,0	3,2	0,0	0,0
26	8213-ID	Bank Dunia	National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2012-2015	01-03-2013	31-12-2018	266,0	258,2	7,8	14,0	10,9	77,7
27	IND-0174	IDB	National Slum Upgrading Project	18-09-2016	04-05-2021	8,0	2,2	5,8	2,2	0,2	10,7
		IDB	National Slum Upgrading Project	18-09-2016	09-05-2021	311,8	117,6	194,2	69,4	44,6	64,3
		IDB	National Slum Upgrading Project	18-09-2016	22-11-2021	10,0	0,7	9,3	0,7	0,0	0,0
		Bank Dunia	National Slum Upgrading Project	11-10-2016	22-03-2022	216,5	36,4	180,1	25,7	19,7	76,7
28	8717-ID	Bank Dunia	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	28-08-2018	31-12-2022	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
29	3122-INO	ADB	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)	17-07-2014	31-12-2019	74,4	69,7	4,7	15,3	11,0	71,9
30	IP-564	Jepang (JICA)	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II)	23-06-2014	23-06-2019	88,3	84,1	4,2	0,0	0,0	0,0
31	IND-0167	IDB	SANIMAS Community-Based Sanitation Project In Indonesia	29-10-2014	12-06-2020	100,0	70,7	29,3	27,6	32,4	100,0
32	8578-ID	Bank Dunia	Second Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)	22-08-2016	31-12-2020	300,0	70,8	229,2	76,5	32,2	42,1

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
									Target	Realisasi	%
33	DNI-00805-023-T	Spanyol	Small Scale Water Treatment Plants for Emergency Relief (SSWTP-ER)	02-08-2016	31-08-2018	16,2	16,2	0,0	8,7	8,7	100,0
<u>Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</u>											
34	IP-575	Jepang (JICA)	Bali Beach Conservation Project (Phase 2)	27-07-2017	27-07-2025	86,8	0,0	86,8	13,1	0,0	0,0
35	INA-19	Korea	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	14-02-2012	22-03-2019	100,2	42,2	58,0	24,4	4,4	17,9
36	IP-552	Jepang (JICA)	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir I	28-07-2009	28-07-2018	53,4	47,7	5,7	1,7	1,1	67,2
37	IP-567	Jepang (JICA)	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II	23-06-2014	23-06-2021	43,6	8,0	35,6	8,2	3,1	38,2
38	8711-ID	Bank Dunia	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) PHASE II	04-08-2017	30-06-2023	125,0	1,4	123,6	2,6	1,4	55,0
		AIIB	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) PHASE II	04-08-2017	30-06-2023	125,0	1,4	123,6	2,6	1,4	55,0
39	3440-INO	ADB	Flood Management in Selected River Basin	09-12-2016	31-12-2022	108,7	4,5	104,2	10,8	2,5	23,2
40	3529-INO	ADB	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	08-09-2017	30-06-2023	500,0	42,0	458,0	7,9	0,0	0,0
	8327-INO	ADB	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	08-09-2017	30-06-2023	100,0	8,0	92,0	7,6	0,0	0,0
41	8121-ID	Bank Dunia	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	18-08-2012	28-02-2019	139,6	81,4	58,2	12,7	1,9	15,0
42	IP-574	Jepang (JICA)	Komerling Irrigation Project (Phase 3)	27-07-2017	27-07-2025	140,0	0,0	140,0	2,9	0,0	0,0
43	IP-573	Jepang (JICA)	Rentang Irrigation Modernization Project	27-07-2017	27-07-2026	424,7	0,0	424,7	20,1	0,0	0,0
44	8891-ID	Bank Dunia	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	23-08-2018	30-06-2024	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
45	IP-559	Jepang (JICA)	Upper Citarum Basin Flood Management	25-07-2013	25-07-2020	29,2	8,1	21,1	7,0	1,1	15,7
46	IP-551	Jepang (JICA)	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	28-07-2009	28-12-2018	65,9	51,4	14,5	1,3	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
									Target	Realisasi	%
47	IP-566	Jepang (JICA)	Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II	23-06-2014	23-06-2021	45,0	33,7	11,3	2,7	2,5	92,2
48	8027-ID	Bank Dunia	Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP II)	14-11-2011	31-05-2018	150,0	145,4	4,6	0,0	0,0	0,0
<u>Direktorat Pembiayaan Perumahan</u>											
49	8717-ID	Bank Dunia	National Affordable Housing Program (NAHP)	24-01-2018	31-03-2021	450,0	13,4	436,6	87,8	13,4	15,3
Kementerian Perhubungan						1.658,6	256,3	1.402,3	303,2	130,8	43,1
<u>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</u>											
50	IND-0133	IDB	The Development of Belawan Port Project Phase I	01-05-2010	05-04-2019	87,6	35,8	51,8	37,1	19,2	51,8
51	IP-577	Jepang (JICA)	Patimban Port Development Project (I)	13-03-2018	13-03-2026	1.046,9	0,0	1.046,9	156,3	63,1	40,4
<u>Direktorat Jenderal Perkeretaapian</u>											
52	IP-563	Jepang (JICA)	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement-Phase I	23-06-2014	20-06-2021	143,7	0,0	143,7	10,2	0,0	0,0
53	EXIM PBC 411	RR Tiongkok	Procurement of Track Material and Turnout Phase II (1500 KM'SP and 500 Unit)	24-01-2017	24-01-2020	175,1	58,8	116,3	99,6	48,5	48,7
54	IP-508	Jepang (JICA)	Railway Electrification and Double-Double Tracking Project I	13-12-2001	11-09-2019	205,4	161,8	43,6	0,0	0,0	0,0
Kementerian Pertanian						267,5	121,3	146,3	24,3	13,6	55,9
<u>Badan Ketahanan Pangan</u>											
55	2000001445	IFAD	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	13-02-2017	31-03-2023	98,5	0,3	98,2	2,5	0,1	2,0
56	2000001960	IFAD	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI)	08-01-2018	31-03-2023	39,9	0,8	39,1	0,8	0,1	12,5
57	835-ID	IFAD	Smallholder Livelihood of Development In Eastern Indonesia (SOLID)	05-07-2011	31-07-2019	49,1	49,2	0,0	3,5	1,9	54,5

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018			
									Target	Realisasi	%	
<u>Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</u>												
58	8188-ID	Bank Dunia	Sustainable Management for Agricultural Research and Technology Dissemination (SMART-D)	25-10-2012	30-06-2019	80,0	71,1	9,0	17,5	11,5	65,7	
Kementerian PPN/Bappenas						62,3	31,4	30,9	9,4	5,6	59,4	
<u>Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana</u>												
59	IP-568	Jepang (JICA)	Profesional Human Resources Development IV	23-06-2014	23-06-2023	62,3	31,4	30,9	9,4	5,6	59,4	
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi						758,5	458,0	300,5	126,5	126,4	100,0	
<u>Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi</u>												
60	8245-ID	Bank Dunia	Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)	12-06-2013	31-12-2020	80,0	35,4	44,6	12,9	8,5	66,3	
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</u>												
61	IP-553	Jepang (JICA)	Development of Bandung Institute of Technology III	28-07-2009	28-12-2018	49,8	39,9	9,9	10,2	8,4	82,0	
62	2099 18 111	Jerman (Kfw)	Development of Teaching Hospital Hasanuddin University	01-11-2017	30-11-2021	33,2	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	
63	IP-549	Jepang (JICA)	Development of World Class University at University of Indonesia	25-07-2008	25-09-2018	128,9	124,8	4,1	27,0	27,0	100,0	
64	IP-576	Jepang (JICA)	Development of World Class University with Socio Entrepreneurial Spirit at Universitas Gajah Mada	13-03-2018	13-03-2025	73,2	0,0	73,2	3,4	0,0	0,0	
65	IP-541	Jepang (JICA)	Hasanuddin University Engineering Faculty Development	26-07-2007	25-07-2019	68,7	63,4	5,3	1,2	1,6	100,0	
66	2928-INO	ADB	Polytechnic Education Development Project	07-02-2013	31-12-2019	75,0	45,9	29,1	17,9	3,7	20,7	
67	IDN-1008	IDB	The Development of Four Higher Education Institutions Project	06-11-2016	09-06-2021	13,9	5,7	8,2	2,9	1,7	58,6	
68	IND-0140	IDB	The Quality Improvement of Padjadjaran University Project	24-07-2011	31-12-2018	26,8	22,3	4,5	3,5	0,8	22,9	
69	IND-0168	IDB	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	14-04-2014	28-10-2019	174,0	108,5	65,5	37,6	71,4	100,0	
	SFD/9/612	Saudi Fund	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	15-09-2014	31-12-2018	35,0	12,0	23,0	9,9	3,4	33,9	

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
									Target	Realisasi	%
Kepolisian Republik Indonesia						72,1	27,7	44,4	16,5	5,7	34,2
70	INA-21	Korea	Fast Patrol Boats for Indonesian National Police	15-07-2014	27-10-2019	33,7	27,3	6,4	16,5	5,7	34,2
71	INA-18	Korea	Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police	14-02-2012	22-11-2018	38,5	0,4	38,0	0,0	0,0	0,0
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						47,4	22,3	25,1	1,5	0,8	54,1
72	8336-ID	Bank Dunia	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	05-06-2014	31-12-2020	47,4	22,3	25,1	1,5	0,8	54,1
PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)						4,6	3,7	0,9	0,9	0,0	0,0
73	8192-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)	12-06-2013	31-12-2018	4,6	3,7	0,9	0,9	0,0	0,0
PT. PERTAMINA						412,4	202,6	209,8	24,8	16,3	65,9
74	8082-ID	Bank Dunia	Geothermal Clean Energy Investment Project	29-06-2012	31-12-2018	175,0	139,5	35,5	0,6	0,4	66,1
75	IP-557	Jepang (JICA)	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	25-10-2011	25-10-2019	237,4	63,2	174,3	24,2	16,0	65,9
PT. PLN						2.435,7	1.083,7	1.352,0	301,9	183,9	60,9
76	IP-532	Jepang (JICA)	Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III	26-06-2008	31-12-2022	243,4	10,2	233,2	8,8	0,1	1,4
77	IP-555	Jepang (JICA)	Engineering Services for Java-Sumatra Interconnection	31-03-2010	31-03-2019	34,2	13,8	20,4	0,1	0,0	0,0
78	IP-572	Jepang (JICA)	GDAP (Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S))	14-10-2016	14-10-2025	5,8	1,0	4,8	1,1	0,6	49,2
79	7940-ID	Bank Dunia	Indonesia Power Transmission Development Project (IPTD I)	30-05-2011	31-10-2019	205,0	161,6	43,4	0,0	21,1	0,0
80	IP-561	Jepang (JICA)	Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)	23-10-2013	23-10-2022	15,2	5,2	10,0	3,5	0,8	22,0
81	3083-INO	ADB	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29-09-2014	30-09-2019	224,0	14,0	210,1	3,6	0,4	11,0
	8276-INO	AIF	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29-09-2014	30-09-2019	25,0	1,5	23,5	0,4	0,0	10,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
									Target	Realisasi	%
82	IP-556	Jepang (JICA)	Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project	26-03-2013	30-04-2022	325,7	15,0	310,7	0,1	0,0	0,0
83	EXIM PBC 330	RR Tiongkok	Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant	03-06-2015	03-06-2020	373,0	193,3	179,7	123,2	74,1	60,2
84	21661901	RR Tiongkok	Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project	02-05-2013	02-05-2018	132,2	101,8	30,4	38,6	8,5	22,0
85	IP-538	Jepang (JICA)	Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project	29-01-2009	29-01-2019	229,1	171,5	57,6	21,2	19,6	92,4
86	8280-ID	Bank Dunia	Scattered Transmission Line and Substation in Indonesia Phase II (IPTD II)	26-03-2014	31-12-2019	137,6	45,1	92,5	0,0	5,6	0,0
87	26180	Jerman (Kfw)	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 3)	05-12-2014	31-05-2019	18,9	0,0	18,9	13,5	0,0	0,0
	CID 1039 01H	Perancis (AFD)	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 7)	25-07-2014	30-06-2018	19,4	9,4	10,0	0,0	0,0	0,0
	28221000	Jepang (JBIC)	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 8)	19-11-2012	14-12-2018	18,3	7,6	10,8	10,9	5,8	53,4
88	CID 1024 01B	Perancis (AFD)	Strengthening West Kalimantan Power Grid	08-02-2013	30-06-2018	49,5	32,3	17,2	0,0	0,0	0,0
	3015-INO	ADB	West Kalimantan Power Grid Strengthening Project	04-04-2014	30-11-2019	49,5	33,8	15,7	10,8	2,0	18,5
89	EXIM PBC 329	RR Tiongkok	Takalar Coal Fired Steam Power Plant	29-04-2015	29-04-2020	241,0	202,3	38,6	60,9	33,1	54,3
90	IP-560	Jepang (JICA)	Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)	23-10-2013	23-10-2022	44,9	29,5	15,4	5,4	10,2	100,0
91	8057-ID	Bank Dunia	Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1.040 MW)	01-05-2012	31-12-2018	44,0	34,9	9,1	0,0	2,2	0,0
PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)						300,0	12,5	287,5	0,0	0,0	0,0
92	8715-ID	Bank Dunia	Additional Financing For Indonesia Infrastructure Finance Facility Project	26-09-2017	28-02-2022	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
93	8714-ID	Bank Dunia	Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)	25-09-2017	31-12-2020	100,0	12,5	87,5	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2018	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2018		
									Target	Realisasi	%
Pemrintah Provinsi DKI Jakarta						1.086,2	687,0	399,2	251,2	92,4	36,8
94	IP-554	Jepang (JICA)	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project	28-07-2009	28-07-2019	423,9	423,1	0,9	0,0	0,0	0,0
95	IP-571	Jepang (JICA)	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II	31-03-2016	31-03-2022	662,3	263,9	398,4	251,2	92,4	36,8
Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)						4.014,9	2.512,7	1.502,2	1.120,5	550,1	49,1
Total						18.530,9	8.035,3	10.495,7	3.177,5	1.579,0	49,7

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id